



**PEMILUKADA
DKI JAKARTA**
Gerindra Optimistis
Menang

GEMA UTAMA >> 04



LOMBOK
Berbuah Melon

EKONOMI KERAKYATAN >> 12



ARUMI BACHSIN
Nasionalisme
Anak Muda

FIGUR >> 15

G E M A

TERBIT 16 HALAMAN/EDISI 13/TAHUN II/MEI 2012

INDONESIA RAYA

www.partaigerindra.or.id

GELORA

SANG PEMIMPIN

PARTAI politik punya cita-cita politik dan pemimpin politik. Tugas partai politik adalah mendidik rakyat bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Arah dan tujuan perjuangan politik ditentukan ideologi dan program. Pengaruh dan kekuasaan merupakan pertarungan yang harus direbut melalui pemilihan umum. Usaha mempengaruhi rakyat dilakukan lewat organisasi dan propaganda. Organisasi artinya menggerakkan mesin partai secara struktural dibantu sayap, kaukus, sel atau organ lainnya sesuai aturan main internal. Propaganda dilakukan melalui rapat umum, kursus kader, iklan, majalah, surat kabar, internet dan lain-lain.

Semua organisasi butuh pemimpin dan massa. Massa adalah rakyat, subyek dan obyek dalam politik. Dukungan rakyat menjadi faktor paling penting dalam perjuangan politik. Tanpa massa, partai tak ada artinya. Massa butuh pemimpin sebagai tiang pendirian, nakhoda yang akan membawa kapal berlayar sampai ke pulau, mencapai cita-cita. Tanpa pemimpin, massa hanyalah gerombolan atau kerumunan tak tentu arah.

Pemimpin yang sebenarnya lahir karena otoritas dan kemampuan baik karena keberaniannya, kepandaianya, kepiawaiannya pidato menguasai jiwa orang lain atau keahlian berorganisasi. Max Weber menyampaikan tiga macam pemimpin. Pertama, pemimpin rasional, yaitu didasarkan kepercayaan dan kemampuan sang pemimpin sebagai pribadi yang punya otoritas. Kedua, pemimpin tradisional, yaitu pemimpin karena keturunan misalnya keistimewaan sebagai raja atau dinasti keluarga yang turun-temurun menguasai daerah tertentu. Ketiga, pemimpin kharismatis yaitu pemimpin besar yang ditakdirkan sejarah punya kharisma dan aura kuat seperti Gandhi, Lenin, Hitler atau di Indonesia, Soekarno. Pemimpin kharismatis memiliki pengikut fanatik yang percaya apapun kata pemimpin.

Dalam kajian tentang tipe kepemimpinan, kita mendapatkan beberapa model kepemimpinan dalam negara dan masyarakat. Pertama, pemimpin sebagai simbol. Ia tak langsung memimpin namun dijalankan atas namanya. Kedua, sebagai gembala yang melayani kaumnya. Ketiga, tipe organisator, mampu mengatur dan membawa organisasi melaksanakan program sesuai yang diharapkan. Keempat, pemimpin diktator, yaitu mempunyai kekuasaan absolut atau mutlak. Menurut Hatta, dalam partai politik diperlukan pemimpin yang memiliki otoritas, disukai masyarakat dan sungguhpun ditentang, ia diakui dan disegani lawan-lawannya.

Bagaimana Indonesia kini? Kita butuh pemimpin nasional yang mampu merumuskan zaman, dan menggerakkan roda sejarah untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Kita perlu pemimpin kuat, visioner, bersih, bertanggung jawab dan berpihak pada rakyat. Kita butuh pemimpin yang memberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidup dan menjamin sumber daya yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepemimpinan yang lemah, penuh keraguan, atau bersandar pada citra semata, hanya membawa kemunduran bangsa bahkan dapat menimbulkan perpecahan. Mari kita berjuang, semoga sejarah melahirkan sang pemimpin yang kita tunggu! ◀ **FADLI ZON**



FOTO: M. ASRIAN MIRZA

PRABOWO SUBIANTO

PARTAI GERINDRA JAGA DAN AMANKAN DEMOKRASI

KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meminta Partai Gerindra untuk menjaga dan mengamankan demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Menjaga dan mengamankan demokrasi itu dalam arti menghilangkan praktik-praktik curang, akal-akalan, dan manipulasi dalam demokrasi.

"Kalau demokrasi itu dirusak dengan praktik-praktik curang, akal-akalan, dan manipulasi, maka pilihan lain di luar demokrasi akan sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Kita memilih demokrasi karena demokrasi adalah jalan yang terbaik. Kita tidak ingin perubahan dengan kekerasan," kata Prabowo Subianto ketika membuka resmi lokakarya yang diselenggarakan Perempuan Indonesia Raya (PIRA), di Jakarta, Jumat 20 April 2012.

Menurut Prabowo Subianto, perubahan yang dilakukan harus melalui kotak suara. Perubahan dilakukan melalui proses pemilihan umum. Kalau perubahan dilakukan dengan kekuatan fisik, katanya, maka akan terjadi perang saudara. Perubahan dengan kekuatan fisik dalam bentuk kerusuhan (antaragama, suku, daerah atau golongan) itulah yang saat ini terjadi di beberapa negara.

Dalam perubahan melalui kotak suara, rakyat memiliki kekuasaan. Satu suara untuk satu orang. Kekuasaan itu hanya pada saat berada dalam bilik suara. Kekuasaan itu bisa dibuang, tidak digunakan, atau digunakan untuk menyelamatkan bangsa. "Jadi, jangan sia-siakan kekuasaan itu, apakah ketika memilih gubernur, anggota DPR, atau presiden. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih maka selama lima tahun

“

Kalau demokrasi itu dirusak dengan praktik-praktik curang, akal-akalan, dan manipulasi, maka pilihan lain di luar demokrasi akan sangat merugikan bagi bangsa Indonesia....

akan menderita," kata mantan Danjen Kopassus itu.

"Maka pilihlah pemimpin yang bersih. Yang kita butuhkan sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang bersih sehingga menghasilkan pemerintahan yang bersih. Tidak hanya pemimpin yang pintar, tapi juga bersih. Kalau hanya pintar, tapi pintar maling akan kacau negara kita ini," tambahnya.

Mantan Pangkostrad ini menegaskan bahwa kader Gerindra terjun ke politik untuk satu tujuan, yaitu perubahan dan perbaikan kehidupan rakyat. Untuk mencapai tujuan itu DPP Partai Gerindra telah melakukan berbagai upaya seperti menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kader di Lembah Hembalang. Pelatihan kader itu terbuka seluas-luasnya, termasuk kaum perempuan.

"Partai Gerindra adalah partai pergerakan yang militan, bersemangat, dan penuh cinta Tanah Air, dengan keberanian dan tekad yang bulat untuk mengubah dan memperbaiki keadaan," tegas Prabowo Subianto

Karena itu, Prabowo mengharapkan, kader Partai Gerindra bisa meyakinkan rakyat bahwa perbaikan dan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. "Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya," kata putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo mengutip firman Allah dalam Al Qur'an.

"Kita harus yakinkan rakyat bahwa tahun 2012 akan ada perubahan bagi bangsa dan negara. Tahun 2014 adalah tahun perubahan, perbaikan, dan kebangkitan bangsa Indonesia," ucapnya.

◀ **BUDI SUCAHYO**

PATUK...!



Presiden SBY janjikan tiga hadiah untuk buruh: penghasilan tak kena pajak dari Rp1,3 juta menjadi Rp2 juta, rumah sakit buruh, dan transportasi murah.

"Gula-gula" untuk meredam aksi buruh ya?

Tiga TKI asal NTB ditembak mati oleh Polisi Diraja Malaysia

Ya begitulah nasib TKI....

Suka dari Awal

Saya sangat suka Partai Gerindra dan Pak Prabowo Subianto, karena saya berharap partai inilah yang akan melakukan perubahan di Indonesia. Dari pertama Partai Gerindra ini muncul kami sudah mendukung. Selamat berjuang dan semoga Bapak Prabowo jadi presiden.

SRY WIN WINS
Air Molek, Riau

Dukung Jokowi dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta

Salam Indonesia Raya, Sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Gerindra untuk Pilkada DKI Jakarta mengusung pasangan Jokowi dan Ahok untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Saya sangat setuju sekali dengan pilihan itu, karena pasangan ini di daerahnya masing-masing telah terbukti berhasil menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai warga Jakarta, saya juga ingin supaya Jakarta ini berubah menjadi kota yang humanis dan ramah, apalagi DKI Jakarta ini sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa Gubernur sebelumnya memang belum bisa membuat Jakarta ini lebih baik, dan kita sangat berharap kepada pasangan Jokowi - Ahok bisa mewujudkan. Tapi di daerah tempat tinggal saya, pergerakan pasangan ini belum tampak.

Saya berharap agar segera dilakukan pergerakan-pergerakan sehingga bisa menyentuh semua lapisan masyarakat di daerah saya. Mohon informasinya dan saya siap dukung 100%. Terima kasih.

EKO SUSENO,
Cakung Jakarta Timur
Koalisi Gerindra

Siap Kerja untuk Prabowo

Salam Indonesia Raya Perkenalkan saya Rukmana sebagai PAC Partai Gerindra Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saya telah melakukan survei secara pribadi di sekitar tempat tinggal saya dengan cara mendatangi orang-orang atau kelompok

dan menanyakan siapa yang pantas jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Hasilnya mereka semua menjawab: Pak Prabowo yang cocok untuk Presiden Republik Indonesia tahun 2014.

Saya dan masyarakat di sini siap mendukung dan bekerja untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya juga berharap dapat informasi tentang perkembangan Partai Gerindra. Terima kasih.

RUKMANA
PAC Partai Gerindra
Majalaya, Karawang,
Jawa Barat

Salam Indonesia Raya, Saya pendukung Bapak Prabowo Subianto dan sangat ingin beliau jadi Presiden Republik Indonesia. Yang saya tanya, apakah benar Partai Gerindra akan melanjutkan koalisi dengan PDI Perjuangan? Karena menurut saya, ini akan merugikan Partai Gerindra nantinya, terutama bagi daerah-daerah yang menjalankan kebijakan pusat. Terima kasih,

ELCONDOR FRAN-
KENSTEIN,
Yogyakarta

Hukum Mati Koruptor

Saya ingat kata-kata Pak Prabowo dalam bukunya Paradox Indonesia: "Negara kita kaya tapi rakyatnya miskin". Hal ini memang nyata sekali, kita kaya dengan hasil bumi, lahan untuk bercocok tanam dan sumber daya manusia. Artinya kita punya semua kemampuan untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara besar dan disegani oleh negara lain.

Tapi ironinya, negara kita dilecehkan oleh negara lain, bahkan oleh negara kecil sekalipun. Saya terus-terang malu, tapi saya juga mencoba cari tahu kenapa negara kita bisa seperti ini. Akhirnya saya dapat jawaban, salah satunya adalah karena korupsi. Korupsi sepertinya sudah membudaya di Indonesia, mulai dari tingkat atas sampai tingkat yang paling bawah. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indo-



ILUSTRASI SUSTHANTO

nesia. Saya usul pada Pak Prabowo, seandainya Pak Prabowo tahun 2014 jadi Presiden, saya ingin koruptor itu dihukum mati, demi kejayaan Indonesia.

SETYAWAN HERU
Surabaya Jawa Timur

Koalisi Partai

Melihat perkembangan politik tingkat nasional sangat dinamis, begitu juga dengan Partai Gerindra. Dalam satu kesempatan saya dapat informasi kalau Partai Gerindra akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tapi sebelumnya Partai Gerindra memosisikan diri sebagai oposisi. Hal apakah yang menyebabkan Partai Gerindra bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat? Mohon penjelasannya supaya dapat juga kita sosialisasikan di daerah. Terima kasih.

SYAM SU RI
Banyuasin
Sumatera Selatan

Penggalangan Suara Partai

Pesan dari kami, kalau Partai Gerindra memiliki 15 juta anggota, dan masing-masing dalam satu minggu

saja bisa mendapatkan minimal 5 orang dari sekitar keluarga atau lingkungannya (suami/istri, orang tua/mertua/ipar, anak/menantu, dsb). Maka, hanya dalam tempo seminggu saja jumlah anggota Partai Gerindra akan mencapai 75 juta. Bukankah ini cara yang paling efisien, efektif, ekonomis, praktis, strategis dan ampuh bukan? Tidak diragukan lagi Gerindra akan menjadi pemenang dalam Pemilu 2014, dan Prabowo Subianto jadi presiden. Sokonglah, percayalah dan yakinlah serta buktikanlah!

TIMMY CHRISTIAN W
DKI Jakarta

Suara Rakyat

Rakyat benci, melihat keadaan negara yang gemah ripah, ternyata hanya omong kosong belaka. Tiba tiba cadangan minyak menyusut tak terkira, semua ribut bagai di neraka. Bicara laksana kiamat telah tiba. Adu hitungan sampai adu suara, rakyat bengong tak mengerti kemana arahnya.

Jero Wacik bicara sampai titik zero, Kwik Kian Gie bicara sampai menunjuk gigi, anggota dewan ribut berselisih paham, ikut Jero apa ikut Kwik. Laksana bebek

berteriak: "kwek kwek kwek". Toh akhirnya BBM naik juga. Buruh akhirnya diam juga, rakyat akhirnya kecece juga. Semua sudah diatur negara, dengan presiden yang gampang curhat kepada rakyatnya

Hanya hitungan bulan BBM akan naik tak terelakkan. Begitupun dengan harga sembako melejit laksana roket, mencekik leher rakyat, menginjak perut wong cilik. Lalu tahankah rakyat kita dicekik dan diinjak?

HELMI SUKRI ADAM
Jawa Barat

Pendaftaran Anggota Partai Gerindra

Saya tertarik dengan Partai Gerindra karena partai ini adalah partai masa depan. Bagaimana cara menjadi anggota Partai Gerindra? Apakah bisa menjadi anggota lewat internet? Terima kasih.

MUHAMMAD
ARSYAD SYARWANI
Balikpapan
Kalimantan Timur

Selamat Hari Kartini

Kartini adalah sosok wanita yang tangguh dan berani melawan arus di tengah

orang-orang sezamannya... siap menanggung resiko atas apa yang di lakukan.... baik maupun buruk,, semoga masih ada wanita-wanita penerus kartini yang tangguh dan berani ... mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Here I am Will you send me an angel

Here I am In the land of the morning star

IMANUEL GINTING
Bogor Jawa Barat

Sinergi antara Sayap Partai

Salam Indonesia Raya. Adanya sayap-sayap partai adalah bukti kecintaan dan harapan sebagai manifestasi pemahaman. Kondisi ini harus disyukuri dan didukung dengan baik. Akan tetapi ada hal yang harus diwaspadai adalah munculnya arogansi, egoisme, dan merasa lebih baik dari yang lain. Mungkin lebih baik adalah bersinergi, bekerjasama, saling mendukung dan saling menjaga. Karena musuh dalam sebuah perjuangan akan melakukan hal yang lebih dari kita.

IRFAN EKOYUDIANTO
Tangerang Banten

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160
Telp: 62-21-789 2377, 780 1396
Fax : 62-21-781 9712
Email: info@partaigerindra.or.id

GEMA
INDONESIA RAYA

Pembina: Prabowo Subianto Pemimpin Umum: Hashim Djojohadikusumo Pemimpin Redaksi: Fadli Zon Wakil Pemimpin Redaksi: M. Asrian Mirza Dewan Redaksi: Suhardi, Halida Hatta, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, Redaktur Pelaksana: Syahril Chilli Redaktur: Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yon W Pati (Artistik), Alfian Kartim (Foto) Staf Redaksi: Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika Sekretaris Redaksi: Wendra Wizar Riset: Hasby M Zamri, Website: Alexander M Manurung Sirkulasi dan Distribusi: Juanda Nurhakim Umum: Agung Budiarto, Ari Sobari Penerbit: Badan Komunikasi Partai Gerindra Alamat Redaksi dan Usaha: Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552 Email: redaksi_gir@partaigerindra.or.id atau redaksi_gir@yahoo.com, Facebook.com/Gerindra, Twitter: @Gerindra

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.



Dicari Pemimpin Anti-Korupsi

OLEH AMRAN NASUTION

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

REFORMASI yang digelorkan tokoh Muhammadiyah Amin Rais dan pendiri YLBHI Adnan Buyung Nasution di tahun 1998, memang berhasil melengserkan Presiden Soeharto. Pemerintahan baru pun terbentuk.

Kini telah 14 tahun berlalu, apakah yang telah kita capai? Korupsi, isu utama yang ditembakkan tokoh reformasi dan pemimpin LSM – terutama Amin dan Buyung – untuk menyerang pemerintahan Presiden Soeharto, sekarang malah tambah merajalela. Berbagai survei membuktikan korupsi tak kunjung berkurang, malah lebih merata ke daerah-daerah.

Sudah banyak pejabat pusat dan daerah, bekas menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian dan Kejaksaan Agung sekarang, misalnya, sedang mengusut korupsi Siti Fadilah Supari, bekas Menteri Kesehatan pemerintahan Presiden SBY sebelumnya. Nyatanya orang seakan tak pernah jera menggarong duit negara. Maka banyak yang mulai putus asa dan berteriak agar koruptor

dihukum mati. Tapi betulkah hukuman mati akan buat jera koruptor?

Bila diamati yang terjadi di China, pendapat itu sama sekali tak terbukti. Sampai pertengahan tahun 2000-an China jadi sasaran serangan LSM internasional seperti *Amnesty International* atau *Human Right Watch*, karena banyaknya eksekusi mati di negeri itu – termasuk untuk para koruptor.

The Dui Hua Foundation, LSM yang berbasis di San Francisco, membuat estimasi di tahun 2007, China mengeksekusi 5000 – 6000 orang/tahun. Jumlah itu menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, ketika sekitar 10.000 terpidana menjalani eksekusi. Salah satu pejabat tinggi China yang dieksekusi adalah Zheng Xiaoyu, Direktur Pengawasan Obat dan Makanan. *Dui Hua* menobatkan China sebagai negara paling tinggi menjalankan hukuman mati perkapita, mengalahkan Singapura dan Iran. Toh nyatanya korupsi tetap saja berkecamuk.

Malah karena tekanan internasional pemerintah China belakangan terpaksa mempersulit eksekusi mati. Mahkamah Agung



ILUSTRASI YON W PATI

China tahun lalu, memerintahkan pengadilan menunda pelaksanaan hukuman mati selama 2 tahun. Sementara itu akan dipersiapkan kebijakan lebih selektif dalam eksekusi mati.

Maka sesungguhnya yang diperlukan negeri kita adalah pemimpin tegas dan berani melawan korupsi. Pemimpin itu harus menjadi teladan, karenanya ia harus bersih dari catatan korupsi.

“Korupsi merebak, dari Bank Century sampai Wisma Atlet. Orang pun teriak agar koruptor dihukum mati. Betulkah hukuman itu bisa melawan korupsi...?”

Adalah sulit, bila seorang pemimpin terlibat korupsi Bank Century, misalnya, tiba-tiba berteriak-teriak menyatakan siap memimpin rakyat berperang melawan korupsi. Sama anehnya, sebuah partai yang banyak pemimpinnya terlibat korupsi Wisma Atlet dan proyek Hambalang, berani berkampanye sebagai partai anti-korupsi. Tapi itulah yang terjadi di negeri kita. ◀

Revolusi Karakter Anak Bangsa



A.S.KOBALLEN. MBA. M.PHIL.
Ketua DPP Partai GERINDRA,
Ketua Umum DPP GEMAS



staf ahli pendukung untuk setiap anggota DPR RI (5 x 560 = 2800 staf ahli). Berapa lagi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk para wakil rakyat, sementara apa yang telah mereka perjuangkan untuk rakyat yang memilih dan menaruh harapan besar pada mereka.... ???

Tidak jelasnya karakter para pemimpin negeri ini yang selalu berteori dalam menjalankan kebijakannya, dan membuat dunia luar senang, menjadi kebanggaan dan budaya baru pemerintahan saat ini. Sehingga banyak kalangan menganggap memang sudah saatnya negeri ini melakukan perubahan total melalui “GERAKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA.”

Karakter adalah suatu ciri, tingkah laku dan moral yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter politisi tidak terlepas dari sejarah partainya, oleh sebab itu dapat juga dikatakan bahwa dewasa ini sulit mencari pemimpin yang berkarakter, apalagi santun dan demokratis. Politisi yang berkuasa kini rata-rata berusia 40-60 tahun. Mereka mengalami fase pematangan berpikir dan bertindak sesuka hati dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, tanpa mendefinisikan rakyat yang mana..?

Karakter politisi memang sukar terlepas dari budaya politik yang membentuknya, itu salah satu penyebab, meski telah sewindu lebih kita menjalani reformasi dengan meletakkan dasar-dasar hukum dan kelembagaan politik

yang demokratis, aktualisasi karakter para aktor di panggung politik tidak serta-merta menjadi demokratis. Budaya politik yang berkembang justru lebih cenderung egosentris, baik itu berorientasi kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan gejala egosentrisme yang menguat itu jelas karakter demokratis melemah, karena karakter demokratis ditandai keterbukaan diri untuk memahami dan menerima kepentingan pihak lain sebagai kepentingan bersama, sedang dengan egosentrisme yang diakui hanya kepentingan diri dan kelompok.

Kata kunci perubahan berada pada rakyat, pemilik kekuasaan yang didelegasikan ke partai-partai politik. Jika rakyat bersikap kritis sudah mampu menjalankan kontrol terhadap sepak terjang partai politik, hingga bisa menghukum partai yang menyimpang dari amanah rakyat, budaya politik perlahan akan bergeser ke arah lebih ideal. Pembentukan massa kritis sebagai kata kunci itu terletak pada keberhasilan sektor pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa yang baik. Budaya politik ideal itu baru akan terwujud kalau kita berani melakukan GERAKAN REVOLUSI KARAKTER ANAK BANGSA melalui pendidikan budi pekerti secara berkesinambungan sejak SD sampai perguruan tinggi, sehingga proses pendidikan fokus pada pembentukan jati diri anak bangsa yang cinta tanah air dan melahirkan motto: NKRI Yang Pancasila dan Harga Mati. ◀

PESTA demokrasi atau pemilu yang akan digelar kurang lebih dua tahun lagi telah dijadikan polemik dan strategi oleh kelompok tertentu ataupun masyarakat umum. Semua partai telah menyiapkan calon presiden serta wakilnya, dan hal yang sama juga sedang dilakukan oleh partai penguasa yang sudah 2 kali memimpin agar dapat berkuasa lagi.

Sebagai seorang presiden yang memimpin dua periode di era reformasi ini, tahu persis betapa banyaknya kerancuan yang terjadi saat ini, seperti Kasus Bank Century yang tidak kunjung selesai, Kasus Mafia Pajak yang berusaha diselimiuti dengan berbagai alasan, dan kasus-kasus penegakan hukum yang tebang pilih, wisma atlet, pembangunan

Hambalang, kasus diskriminasi etnis dan agama (GKI Yasmin), Lumpur Lapindo, dll. Sehingga era pemerintahan ini serasa begitu gamang dan tidak pasti, seperti negara tanpa pemimpin.

Kesenjangan sosial ini dapat terlihat dari pihak-pihak yang membantu presiden *WRONG MAN IN THE RIGHT PLACE*, termasuk apa yang dikatakan oleh Ketua DPR RI yang selalu mengatakan tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di lembaga yang dipimpinnya, khususnya dalam hal renovasi ruangan Banggar yang menelan Rp 20 miliar, halaman parkir, dan renovasi kamar mandi yang semuanya dengan biaya miliaran rupiah. Belum termasuk akan ditematkannya 5 orang



FOTO ALFIAN KARTINI

PEMILUKADA DKI JAKARTA

Gerindra Optimistis Menang

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta akan digelar 11 Juli 2012. Saat ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tengah melakukan beragam upaya dan manuver untuk menjaring suara warga. Partai Gerindra optimistis pasangan Jokowi – Basuki akan memenangkan Pemilukada DKI Jakarta.

OLEH BUDI SUCAHYO

MOBIL bertuliskan "Jakarta Baru, Jokowi – Basuki" sudah lalu lalang di Jakarta. Mobil boks berwarna putih itu terlihat berlalu lalang di beberapa tempat, seperti Fatmawati, Cilandak, dan Kuningan. Pada setiap sisi mobil boks itu terpampang *running* poster bergambar Jokowi dan Basuki. Pada satu sisi menampilkan foto pasangan Jokowi – Basuki dengan baju kotak-kotak berwarna merah tengah memegang miniatur kereta api. Dan di sisi lainnya, tampak Basuki berdiri tersenyum seorang diri dengan baju kotak-kotaknya.

Di sisi belakang mobil menampilkan peta Jakarta yang disusun dari kata-kata berwarna-warni, yang

mewakili lokasi-lokasi utama di Jakarta, seperti Pondok Indah, Menteng, Fatmawati, dan lain-lain. Pada bagian tengah peta tersebut tampak mencolok tulisan "Jakarta Baru, Jokowi – Basuki".

Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah mengusung pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta yang akan digelar pada 11 Juli 2012. Saat ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tengah melakukan upaya untuk menarik suara warga Jakarta.

Salah satunya dengan mobil kampanye pasangan Jokowi – Basuki tersebut.

Rupanya, mobil boks putih itu merupakan "warisan" kampanye Megawati – Prabowo pada pemilihan presiden 2009. Usai pemilihan, mobil yang dimiliki adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo, itu tidak terpakai. Mobil itu kemudian ditawarkan kepada pasangan Jokowi – Ahok. Jumlahnya 28 unit, semuanya dalam kondisi rusak di bengkel. Setelah diperbaiki dan dicat ulang, mobil kampanye itu sudah lalu lalang di jalan-jalan ibu kota.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, optimistis pasangan Jokowi – Ahok yang

diusung partainya bersama dengan PDI Perjuangan akan menang. Optimisme itu muncul setelah melihat dukungan warga Jakarta yang semakin meluas terhadap pasangan ini. Padahal Jokowi – Ahok berasal dari daerah yang berbeda. Joko Widodo berpengalaman menjadi Wali Kota Solo. Sedangkan Ahok juga sukses menjadi Bupati Belitung Timur.

"Keduanya bukan asli Jakarta. Keduanya datang dari dua daerah yang berbeda. Tapi keduanya dalam waktu dekat mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Itu yang membuat saya optimistis keduanya akan memenangkan Pemilukada DKI Jakarta," kata Prabowo saat mengunjungi Solo Techno Park, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 14 April 2012.

Dalam kesempatan itu Prabowo membantah kedua pasangan itu mendapatkan kucuran dana yang cukup besar. "Siapa bilang saya memberikan dana kepada Jokowi. Saya tidak memberikan dana. Mereka cari dananya sendiri," kata mantan Danjen Kopassus ini. Penggalangan dana kampanye dilakukan pasangan Jokowi – Ahok dengan menjual baju kotak-kotak, kata Prabowo, ini merupakan pembelajaran bahwa berpolitik tidak harus memiliki dana banyak.

Calon wakil gubernur Ahok kepada *Gema Indonesia Raya* juga menegaskan bahwa tidak ada permainan uang di balik pencalonannya bersama Jokowi. "Kami hanya ingin dilihat oleh rakyat bahwa Gerindra merupakan partai yang benar-benar tidak main uang. Jadi, kalau Pak Jokowi dan saya tidak

menang pun, itu bukan kerugian bagi Partai Gerindra. Yang penting kami sudah mengajukan orang yang jujur dan berprestasi. Karena kalau jujur saja tapi tidak pintar, tidak ada gunanya," kata Ahok.

Jakarta, menurut Ahok, mempunyai pengaruh besar. Sukses memimpin di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, atau Kotamadya Solo, Provinsi Jawa Tengah, tidak akan berdampak apa-apa terhadap Indonesia. "Tapi bila saya dan Pak Jokowi berhasil memimpin di Jakarta maka dampaknya akan sangat besar bagi bangsa Indonesia," lanjut Ahok.

Karena itu sejumlah konsep untuk membangun ibu kota sudah disiapkan, antara lain beasiswa bagi siswa tak mampu, mengurus administrasi tanpa adanya pungutan liar, kartu sehat, penggabungan izin trayek, kereta dan bus Transjakarta, mengatur keberadaan mal dan pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengungkapkan, optimisme Jokowi – Ahok akan menang memang beralasan, karena tim sukses dari pasangan Jokowi – Ahok adalah masyarakat Jakarta. Ini terbukti dari banyaknya warga Jakarta yang mengisi formulir untuk menyosialisasikan pasangan Jokowi – Ahok di masing-masing lingkungannya.

"Tugas masyarakat yang menjadi tim sukses cuma satu, yaitu menyosialisasikan pasangan Jokowi – Ahok ke lingkungan terdekatnya. Saat ini jumlah warga yang mengisi formulir sudah di atas 50 ribu orang," kata Taufik. ◀

Menggalang Dana Lewat Baju Kotak-Kotak

BAJU motif kotak-kotak yang dikenakan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi – Ahok) saat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada 24 Maret 2012 telah menjadi ikon khas pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerindra itu.

Seragam yang dikenakan duet ini menyedot perhatian masyarakat. Sebab, tidak lazim pasangan calon kepala daerah mengenakan seragam seperti pakaian penyanyi "country". Berulang kali Jokowi maupun Ahok mengungkapkan filosofi di balik kemeja bermotif kotak-kotak itu. Simbol kotak-kotak menandakan bahwa Jakarta terdiri dari berbagai suku dan warna. Sedangkan penggulungan lengan baju hingga ke siku menyiratkan pesan siap bekerja keras turun ke lapangan untuk melayani warga dan menyelesaikan masalah di Ibu Kota Indonesia.

Kini, baju kotak-kotak itu tidak lagi sekadar penanda identitas Jokowi dan Ahok menjelang pertarungan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, tetapi juga bakal menjadi salah satu sumber pemasukan uang untuk membiayai kampanye pasangan ini. Jokowi tengah menyiapkan kemeja kotak-kotak untuk dijualnya sebagai dana kampanye. Saat berkunjung ke konveksi di Nusukan, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (13 April 2012), Jokowi mengungkapkan telah memesan 90.000 potong kemeja untuk dijual sebagai penggalangan dana kampanye.

Dari jumlah itu 70.000 potong dikerjakan di Jakarta. Sisanya dikerjakan sejumlah usaha konveksi kelas kecil di Surakarta dan sekitarnya seperti di Nusukan, Sondakan, Kaliyoso, Kalijambe, serta Grogol Solo Baru. Kemeja tersebut akan dijual seharga Rp 100 ribu per potong. Sedangkan biaya produksi hanya sebesar Rp 50 ribu. Setelah dikurangi biaya produksi, uang jualan baju yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dana kampanye. Selain untuk modal kampanye, pembuatan kemeja itu juga bertujuan untuk menggairahkan sektor industri kecil atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Jokowi mengaku pesanan baju kotak-kotak dari masyarakat luar bisa banyak. Dia menduga mungkin pesanan itu merupakan dukungan simpatik masyarakat Jakarta. "Sudah banyak peminat dan sudah banyak relawan yang siap memasarkan baju kotak-kotak ini," ujar Jokowi. ◀

Popularitas Jokowi dan Ahok Terus Menanjak

Hasil survei menunjukkan popularitas (elektabilitas) calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bertambah.

OLEH BUDI SUCAHYO

KETIKA hadir dalam acara diskusi "Jakarta Baru: Kenapa Harus Jokowi-Ahok?" di Waroeng Solo, Jakarta, Minggu 22 April 2012, calon gubernur DKI Jakarta dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Joko Widodo menyatakan optimistis akan mengungguli calon *incumbent* Fauzi Bowo. Optimisme itu muncul setelah melihat berbagai hasil survei yang menempatkan posisi pasangan Jokowi Widodo – Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang terus menempel ketat pasangan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli.

Beberapa lembaga survei yang telah mempublikasikan hasilnya menunjukkan tingkat popularitas maupun elektabilitas Joko Widodo – Ahok terus menanjak. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Fauzi "Foke" Bowo – Nachrowi Ramli (Nara) mendapat dukungan 49,1%. Di posisi kedua pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama mendapat 14,4% suara, disusul pasangan Hidayat Nur Wahid – Didik Rachbini dengan 8,3% suara. Posisi berikutnya, berturut-turut: Faisal Basri – Biem Benjamin (5,8%), Alex Noerdin – Nono Sampono (3,9%) dan Hendarji Soepandji – A Riza Patria (1,2%).

Berdasarkan survei yang dilakukan LSI sejak 26 Maret hingga 1 April itu, kesukaan warga terhadap sosok Jokowi – Ahok menyentuh angka 75%. Hanya berbeda tipis dengan pasangan Foke – Nara yang mencapai 79,1%. Bahkan jika Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 harus berlangsung dua putaran, pasangan Jokowi – Ahok merupakan kandidat kuat yang akan terus melaju. Apalagi, langkah-langkah yang dijalankan Jokowi saat ini mampu mengambil hati warga Jakarta. "Semua bisa saja terjadi. Apalagi jika ada terobosan dahsyat yang dilakukannya," kata Toto Izzul Fatah, peneliti LSI, ketika menyampaikan hasil survei pada 8 April lalu.

Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) tak jauh beda dengan LSI. Puskaptis merilis hasil survei calon gubernur DKI Jakarta yang dilakukan sejak 2 hingga 7 April 2012 terhadap 1.250 responden



Joko Widodo

yang tersebar di DKI Jakarta. Hasilnya, pasangan calon *incumbent* Foke – Nara berada di urutan pertama dengan 47,22%. Di posisi kedua adalah pasangan Jokowi – Ahok dengan memperoleh 15,16%. Disusul posisi ketiga, yaitu pasangan Hidayat Nur Wahid – Didik Rachbini dengan 10,28%.

Sedangkan di posisi keempat adalah pasangan independen Faisal Basri – Biem Benjamin dengan 3,17%. Sementara di posisi kelima diperoleh pasangan Alex Noerdin – Nono Sampono dengan 2,3%. Posisi paling buncit ditempati pasangan independen Hendarji Supandji – A. Riza Patria dengan 1,55%. Terdapat 20,23% responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Puskaptis menyatakan bahwa terdapat potensi dua putaran dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta. "Melihat tren elektabilitas ini, ada potensi dua putaran. Jika terjadi dua putaran, akan jadi persaingan sengit," kata Direktur Puskaptis, Husin Yasin, ketika menyampaikan hasil survei di Jakarta, Minggu 15 April 2012. Puskaptis memperkirakan, jika terjadi dua putaran, calon *incumbent* akan berhadapan dengan pasangan Jokowi – Ahok atau Hidayat Nur Wahid – Didik Rachbini.

Pengamat politik dan bakal calon dalam Pilkada DKI Jakarta mencurigai hasil survei yang dilakukan LSI dan Puskaptis. Ada yang janggal dalam hasil kedua survei itu sehingga menguntungkan salah satu

pihak tertentu. Hasil 47% bagi *incumbent* sangat distorsif. Pasalnya, elektabilitas *incumbent* sebelumnya hanya mentok di 30-an persen. Dikhawatirkan polling itu sebagai alat strategi untuk menggiring opini.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Eep Saefullah Fatah, mengatakan survei sering dijadikan alat oleh calon yang hendak melaju di Pilkada. "Seringkali survei ini digunakan untuk memobilisasi psikis pemilih," kata Eep dalam diskusi "Jakarta Baru: Kenapa Harus Jokowi – Ahok?", di Jakarta, Minggu 22 April 2012.

Caranya, dengan memainkan *margin of error* dalam statistik survei tersebut. Ini menyebabkan perbedaan hasil antara satu calon dengan calon lainnya terlihat cukup jauh. Jika ada lembaga yang menyampaikan hasil survei dengan mengatakan bahwa lembaganya independen, maka sebaiknya jangan mudah percaya. "Bohong kalau bilang independen," kata Eep.

Bila calon gubernur lain menanggapi negatif hasil survei LSI dan Puskaptis karena dianggap kontroversial, calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama justru menyambut positif. "Kami harus berterimakasih kepada LSI yang telah menempatkan kami pada urutan kedua. Sebelumnya, kami berada di urutan keempat," kata mantan Bupati Belitung Timur.

Survei itu, lanjut Ahok, akan menjadi titik penting bagi orang-orang yang tidak menyukai kepe-



Basuki Tjahaja Purnama

mimpinan Fauzi Bowo saat ini. Ia yakin, banyak warga Jakarta yang akan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi – Ahok. "Kami menjual rekam jejak. Orang-orang tidak mau dengan visi yang muluk," kata Ahok yang dicalonkan sebagai wakil gubernur dari Partai Gerindra ini.

Terus bertambah

Lembaga lain yang melansir hasil survei terhadap peluang enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 adalah *The Cyrus Network*. Survei dilakukan di seluruh Kotamadya Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, dengan responden random sebanyak 1000 orang pada 8 – 16 April 2012.

Hasilnya, apabila Pilkada DKI Jakarta digelar pada April, maka pasangan Foke – Nara mendapat 42,2%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh pasangan Jokowi – Ahok dengan 31,8% atau terpaut 11% dari Foke – Nara. Sedangkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lainnya kurang dari 10%. Hidayat Nurwahid – Didik Rachbini mendapatkan suara 7,9%, Faisal Basri – Biem Benjamin memperoleh 4,4%, Alex Noerdin – Nono Sampono 2,7%, dan Hendarji Supandji – A. Riza Patria sebanyak 2,2%.

Menurut Direktur Eksekutif *Cyrus Network*, Hasan Nasbi, pasangan Jokowi – Ahok mendapatkan popularitasnya di Jakarta dengan

hanya "berkampanye" selama 5 bulan. "Jika membandingkan hasil perolehan 5 tahun Fauzi Bowo dengan 5 bulan Joko Widodo, maka selisih angka sebesar 11% ini justru akan menjadi momok menakutkan bagi *incumbent*," katanya ketika melansir hasil survei di Pisa Cafe Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 April 2012.

Hasan menuturkan, akselerasi dukungan terhadap Jokowi – Ahok terhitung cepat. Ia memprediksi bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan, popularitas Jokowi – Ahok akan terus bertambah.

Rupanya, popularitas dan elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Joko Widodo selalu dipantau banyak pihak. Tak terkecuali pantauan dari Partai PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra.

Joko Widodo mengakui, dalam kunjungan singkatnya di Solo pada Kamis, 19 April 2012, Megawati Soekarnoputri, orang nomor satu di partai berlambang banteng tersebut menanyakan hasil survei terakhir pasangan Jokowi – Ahok ini. "Tadi di mobil, bu Mega tanya bagaimana hasil survei saya yang terakhir. Ya, saya laporkan semuanya kepada bu Mega," kata Jokowi kepada pers di sela mendampingi Megawati makan malam di Solo, Jawa Tengah, Kamis 19 April 2012.

Kepada Megawati, Jokowi memaparkan grafik peningkatan hasil survei. "Saya laporkan semuanya. Awal Desember lalu hasil surveinya 6%, terus naik 17%, dan sekarang sudah 33%," kata Jokowi. ◀



FOTO ALFIAN KARTIM

AMANDEMEN UUD 1945

Gerindra Ingin Naskah Historis Dikembalikan

Partai Gerindra tidak menolak perubahan UUD karena UUD bukanlah sesuatu yang sakral. Partai Gerindra menginginkan kembalinya naskah historis UUD 1945 dari para pendiri bangsa dan hasil perubahan UUD berupa adendum.

OLEH BUDI SUCAHYO

SELASA siang, 17 April 2012, Fadli Zon Library, di Jalan Danau Limboto, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, kedatangan tamu penting. Mereka adalah Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas dan Bambang Soeroso (Ketua Kelompok DPD MPR RI) serta beberapa anggota DPD RI. Tamu ini diterima tuan rumah Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang didampingi antara lain Martin Hutabarat (Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI), Sadar Subagyo (anggota Komisi XI Fraksi Partai Gerindra), Amran Nasution (anggota Dewan Penasihat), Haryadi Dharmawan (anggota Dewan Pembina).

Silaturahmi Partai Gerindra dan DPD RI ini terkait dengan wacana perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 yang diusung DPD RI. Dalam kesempatan itu GKR Hemas mengatakan, meski UUD 1945 sudah mengalami amandemen pertama hingga keempat masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Sebab, dalam perubahan konstitusi pertama hingga keempat masih banyak kepentingan yang bermain.

Dalam wacana perubahan kelima UUD ini, Hemas memastikan bahwa perubahan itu bukan semata-mata untuk kepentingan DPD RI melainkan demi kepentingan nasional. Setelah mendapat masukan dari para pakar, akademisi, dan masyarakat, Hemas mengatakan bahwa perubahan kelima UUD itu sudah menjadi kebutuhan. "Amandemen kelima UUD itu merupakan kebutuhan semua pihak," ujar istri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu.

Dengan perubahan kelima UUD, kata anggota DPD dari Jogjakarta itu melanjutkan, agar DPD RI bisa difungsikan dengan segala potensinya. "Untuk memosisikan DPD sesuai dengan konstitusi," katanya.

Tak jauh berbeda, Bambang Soeroso menambahkan bahwa keinginan melakukan perubahan kelima UUD merupakan kristalisasi dari aspirasi masyarakat setelah melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Selain itu, materi amandemen kelima UUD sudah melewati pengkajian dan penelaahan 75 perguruan tinggi di Indonesia. "Mela-

lui pengkajian dan penelaahan itu kemudian dirumuskan persoalan ketatanegaraan pasca amandemen keempat," kata anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu itu.

Bambang menjelaskan, ada 10 isu strategis dalam amandemen kelima UUD, salah satu di antaranya adalah isu eksistensi DPD RI. "Pada waktu lalu, DPD lahir dari kompromi politik," ujarnya. Dua isu strategis lainnya yang menonjol adalah isu sistem presidensial dan isu otonomi daerah.

"Kita ini menganut sistem presidensiil, tetapi presidennya justru tersandera. Sistem presidensial yang kita jalankan adalah sistem presidensial bercitarasa parlementer," kata Bambang. Begitu pula dengan isu otonomi daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan, namun terlihat sudah seperti negara federal. "Ini akan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa," ujarnya.

Bambang menyadari bahwa bergulirnya amandemen kelima UUD ini harus melalui proses politik, terutama di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses politik itu bergantung pada partai politik. Karena itulah, dalam mengusung amandemen kelima UUD ini, DPD telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah partai politik.

DPD menginginkan amandemen kelima UUD ini bisa dilakukan pada tahun ini. Pada medio November mendatang akan dilakukan pertemuan dalam sebuah forum bersama dengan fraksi-fraksi di MPR RI. "Kalkulasi kita pada 2013, partai politik sudah disibuk-

kan dengan persiapan Pemilu 2014. Karena itu, waktu yang paling tepat untuk menggulirkan amandemen kelima ke MPR adalah 2012. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" kata Bambang.

Naskah historis

Menanggapi wacana amandemen kelima UUD, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui bahwa proses amandemen pertama sampai keempat penuh dengan pertarungan kepentingan. Ini terbukti pada Pasal 33 hasil amandemen dan hilangnya penjelasan. Dalam hal ini Partai Gerindra melalui manifesto perjuangannya telah menyatakan kembali ke UUD 1945.

"Kita tidak menolak perubahan, karena UUD bukanlah sesuatu yang sakral. Tapi kita menginginkan kembalinya naskah historis UUD 1945 dari para pendiri bangsa. Kalau kita lihat UUD yang sekarang tidak ada lagi jejaknya. Bahkan, seperti dilakukan mutilasi," kata Fadli Zon. Selain itu, Partai Gerindra juga menginginkan agar perubahan atau amandemen itu berupa adendum. Perubahan yang telah terjadi seperti hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial tetap berlaku.

Untuk itu, dalam UUD hasil amandemen digunakan tanda "bintang satu, dua, tiga, atau empat" untuk menunjukkan perubahan dilakukan pada amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. "Ini akan membingungkan.

Kalau dilakukan perubahan yang kesepuluh atau ketigapuluh, maka bintangnya akan semakin banyak," katanya.

Haryadi Dharmawan, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, juga menginginkan kembalinya ruh UUD 1945 yang dirumuskan para pendiri bangsa dan disahkan pada 18 Agustus 1945. "Ini adalah masalah sejarah bangsa, yaitu bagaimana kita melihat awal kesepakatan para pendiri bangsa," kata tokoh pergerakan pada awal reformasi 1998 itu.

Mantan ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia itu juga setuju dengan istilah adendum, bukan amandemen. "Yang terpenting, jiwa UUD 1945 harus ada lebih dulu. Karena itu perlu hati-hati melakukan perubahan. Kita letakkan pada sumber asalnya. Kalau perubahan mengikuti zaman silakan, namun jangan meninggalkan benang merah," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Martin Hutabarat menambahkan bahwa kembali ke UUD 1945 tidak berarti secara penuh kembali ke teks UUD 1945, melainkan kepada jiwa UUD 1945. "Partai Gerindra siap membantu dalam upaya perubahan kelima UUD untuk kepentingan bangsa," kata anggota Komisi III DPR ini.

Menanggapi sikap Partai Gerindra, GKR Hemas mengakui bahwa perubahan UUD sebaiknya dilakukan dengan adendum. "Saya kira kita setuju perubahan dengan adendum. Sehingga dengan demikian naskah UUD yang asli bisa terlihat dengan jelas," ujarnya. ◀

Kisah Dibalik Angka

Rupanya, alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM adalah untuk menutupi kebocoran dana dari PLN. Politisi Gerindra mengungkap hitungannya.

OLEH IMAN FIRDAUS



FOTO ISTIMEWA

PEMBAHASAN RUU tentang APBN 2012 telah selesai, meski menyisakan kontroversi. Dalam rapat paripurna yang berlangsung berjam-jam dan dramatis, pemerintah dan partai koalisi sepakat dengan opsi kedua, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, Pasal 7 ayat (6A) UU APBN 2012 yang tegas menyebutkan: "Dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15%, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya," demikian bunyi penambahan ayat 6A tersebut.

Namun, di balik keberhasilan DPR dan pemerintah yang sepakat dengan penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012, terselip soal alasan sesungguhnya dari rencana kenaikan harga BBM tersebut. Menurut Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Sadar Subagyo, ada yang tidak masuk akal dalam soal rencana kenaikan harga BBM tersebut. "Bila yang disoal adalah gejala harga minyak dunia dan krisis utang di Eropa, adalah tidak masuk akal. Dalam penyusunan APBN 2012, secara cermat gejala harga minyak mentah dunia dan juga ketegangan di Timur Tengah sudah diperhitungkan. Begitu juga soal krisis utang

di Eropa, diperhitungkan sebagai faktor dalam penyusunan APBN 2012," katanya.

Rupanya, dari sekian banyak perubahan angka-angka dalam usulan APBN Perubahan 2012, yang sangat menarik untuk dicermati adalah besaran subsidi listrik. Dan ini yang justru lolos dari pemantauan banyak pihak. Pada APBN 2012 subsidi listrik ditetapkan Rp 45 triliun, turun signifikan dari subsidi listrik APBN 2011 yang mencapai Rp 65,6 triliun. Namun dalam usulan APBN Perubahan 2012 subsidi listrik diusulkan naik secara luar biasa dari Rp 45 triliun menjadi Rp 88 triliun.

Di sisi lain, pemakaian solar oleh PLN pada 2012 mengalami penurunan konsumsi hingga mencapai 50%, dari 4,7 juta kilo liter (2011) menjadi 2,3 juta kilo liter (2012). Namun di dalam RAPBN Perubahan, pemakaian solar malah melonjak lagi menjadi 5,54 juta kiloliter, naik hingga di atas 100%. Tentu saja memunculkan keanehan, mengapa di saat pemakaian solar menurun, justru subsidi listrik membengkak?

Menurut Sadar, untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus melihat lebih dalam lagi kondisi produsen listrik nasional yang penjualannya dimonopoli oleh PLN. Sebab, di sinilah pangkal soalnya. Setelah ditelisik secara cermat, ternyata proses penyediaan listrik yang menjadi sebab. Salah satu alat

ukur tingkat kesehatan perusahaan adalah dengan melihat *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu perbandingan antara pendapatan bersih perusahaan dengan kewajibannya membayar utang. Perusahaan dikatakan sehat apabila minimal DSCR sekitar 3.

Dilihat dari DSCR, sejatinya saat ini PLN dalam keadaan darurat. Jika tidak ditolong maka DSCR PLN akan negatif, dan ini berarti PLN jebol dan bangkrut. Bukan APBN yang jebol. "Di sini pula jawaban pertanyaan dan keanehan berada," kata Sadar.

Jika subsidi ke PLN tahun ini hanya Rp 45 triliun (sesuai APBN 2012), maka PLN akan tekor hingga Rp 35,72 triliun, yang terdiri dari *net income minus* Rp 17,25 triliun dan kewajiban membayar hutang sebesar Rp 18,47 triliun. Karena itu, pemerintah mau tidak mau harus menambah subsidi listrik setidaknya naik dari Rp 45 triliun menjadi Rp 88 triliun, agar DSCR PLN menjadi positif, meskipun masih jauh di bawah minimum DSCR yang sehat, yaitu sekitar 3.

Karena keadaan darurat, maka cara yang ditempuh pun darurat termudah, yakni mengurangi subsidi BBM, yang sekalian memenuhi tuntutan IMF yaitu mengurangi subsidi BBM.

Nah, menjadi sangat masuk akal jika pemerintah ngotot mengubah asumsi makro serta menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 karena perubahan asumsi makro akan menambah pemasukan sebesar Rp 47 triliun dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah pemasukan Rp 60 triliun sehingga total penerimaan akan bertambah Rp 107 triliun.

Penambahan penerimaan dari hasil kenaikan BBM ini kemudian akan digunakan untuk: Menambah subsidi listrik (menyelamatkan PLN) sebesar Rp 43 triliun, pemberian BLT Rp 30,6 triliun, tambahan subsidi BBM dan LPG Rp 13,8 triliun dan sisanya sebesar Rp 19,6 triliun digunakan untuk tambahan belanja infrastruktur dan pendidikan.

Dari urutan besarnya penggunaan tambahan hasil menaikkan BBM, jelas terlihat bahwa paling besar adalah untuk menolong PLN, sedangkan pembengkakan subsidi BBM yang selama ini digembargemborkan sebagai biang kerok penghambat pembangunan, justru berada pada urutan bontot, apalagi jika yang dipersalahkan adalah subsidi BBM (solar dan premium). Artinya, penambahan beban subsidinya sangat tidak berarti, hanya Rp 2,45 triliun. "Hal ini sangat

mengusik rasa keadilan. Mengapa kesalahan perhitungan PLN dibebankan ke rakyat? Dan mengapa pemerintah terkesan menutupi permasalahan ini?" tanya Sadar.

Pada hal, ada banyak cara untuk menyelamatkan PLN tanpa harus membebani dan menambah kesengsaraan rakyat. Salah satunya adalah menaikkan harga listrik (TDL) sebesar 10% yang akan menambah penerimaan sekitar Rp 9 triliun. Kenaikan harga listrik dampak negatifnya jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan harga BBM dan akan merangsang tumbuhnya pembangkit-pembangkit swasta yang mengandalkan *renewable energy*.

Memang, angka Rp 9 triliun masih jauh dari mencukupi, karena tambahan subsidi listrik yang dibutuhkan minimal sebesar Rp 43 triliun. Kekurangan pendanaan dapat ditutup dengan penerbitan obligasi konversi senilai Rp 40 triliun yang dijamin oleh negara/pemerintah dan wajib dibeli oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki kemampuan, serta pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).

"Ini mungkin menjadi salah satu alternatif solusi yang lebih bijak dan tidak menambah sengsara rakyat," pungkas Sadar. ◀



**DPP PARTAI GERINDRA
 MENGUCAPKAN SELAMAT ULANG TAHUN KE-39
 HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI)**



(27 April 1973 – 27 April 2012)

Semoga HKTI di bawah kepemimpinan
 Bapak H. Prabowo Subianto memberikan karya nyata
 bagi kemajuan petani dan pertanian Indonesia



TEMU ILMIAH DPP GERINDRA

LPG Lebih Irit dari BBM

Sepeda motor berbahan bakar gas merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Dibanding BBM, motor BBG jauh lebih irit dan ramah lingkungan.

OLEH M. BUDIONO

MENGALIHKAN ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan menyubstitusikannya menjadi gas merupakan langkah bijak. Terlebih melihat kondisi harga minyak bumi yang terus naik. Juga karena cadangan minyak bumi Indonesia kian hari semakin menipis. Sementara gas yang terkandung di bumi Indonesia masih sangat besar, dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, penggantian minyak ke gas akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemakainya. Pertama, karena harga gas lebih murah dibanding minyak. Pemakaian gas, juga lebih irit. Selain itu, sisa pembakaran gas relatif lebih sehat dibanding minyak.

Itulah antara lain kesimpulan Temu Ilmiah yang dilaksanakan DPP Partai Gerindra di kantor sekretariat DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM No 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/4). Temu ilmiah itu menegenahkan tema "Efisiensi BBM."



FOTO ISTIMEWA

Pada kesempatan itu, Biro Kepemudaan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menyajikan sebuah sepeda motor yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menggunakan bahan bakar gas LPG 3 kg. Menurut Ketua Biro Kepemudaan DPD Gerindra DKI Jakarta, Khoir Sarifudin Siregar, motor hasil modifikasi itu lebih irit dalam mengonsumsi bahan bakar.

Buktinya penggunaan gas LPG 3 kg pada motor bisa menempuh jarak hingga 300 km. Artinya, setiap 1 kg gas LPG mampu menempuh

jarak 100 km. Angka ini sangat efisien, karena harga setiap kilogram gas LPG maksimal Rp 5.000. Dengan begitu, untuk menempuh jarak sejauh 300 km biaya yang dibutuhkan maksimal Rp 15.000.

Bandingkan bila sepeda motor menggunakan bahan bakar premium, yang harga per liternya Rp 4.500. Untuk mencapai jarak sejauh 300 km dibutuhkan kira-kira mencapai 10 liter premium atau setara dengan Rp 45.000. Artinya, penggunaan bahan minyak tiga kali lebih boros dibanding memakai ba-

han bakar gas.

Untuk mengalihkan bahan bakar minyak menjadi gas, menurut Khoir, tidaklah sulit. Tinggal mengangkat seluruh perlengkapan dalam karburator motor. Kemudian menutup semua lubang yang kemungkinan ada di bodi karburator. Cara ini dilakukan untuk memberi jalan bagi gas masuk ke dalam saluran mesin sebagaimana halnya minyak.

"Ringkasnya, tabung dan pipa gas dihubungkan ke slang menuju karburator. Sementara tabungnya

sendiri bisa diikat ke bodi motor melalui briket yang ditaruh di bagian belakang motor", kata Khoir menjelaskan.

Sebagai antisipasi terjadinya kebocoran, sebelum masuk ke karburator bisa juga dibuatkan *switch on/off* yang berfungsi membuka saluran pipa gas saat mau jalan. Dan menghentikan aliran gas ketika berhenti. Penggunaan gas LPG, menurut Khoir, ditanggung aman dan jauh dari kemungkinan meledak. "Jadi tidak perlu takut, dan silakan mencoba", tambah Khoir. ◀

Pokok-Pokok Perjuangan Gerindra di Bidang Riset & Teknologi

Departemen Pembangunan Daerah DPP Partai Gerindra menggelar temu ilmiah yang menghadirkan pakar riset teknologi terapan. Program apa yang dilakukan Gerindra?

OLEH AGUSTAMAN

KONDISI negara sepanjang 2011-2012 ini yang penuh dengan politik pencitraan, budaya korupsi dan sebagainya, menjadi peluang bagi Partai Gerindra untuk mengaplikasikan semua program perjuangan politik, program ekonomi-sosial, dan program lainnya yang berbasis pada teknologi terapan yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia.

"Teknologi terapan apa yang bisa

ditempuh oleh Gerindra? Semua teknologi terapan yang langsung bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, yakni pangan, sandang dan papan yang murah dan terjangkau," papar Prof. Dr. Frans Suharno di depan para pimpinan DPP Partai Gerindra, antara lain Prof. Suhardi dan anggota DPP Gerindra lainnya, pada Rabu, 4 April 2012, di DPP Partai Gerindra, Jakarta.

Pakar riset dan teknologi terapan ini hadir sebagai salah satu pembicara Temu Ilmiah bertema "Rahasia Menuju Kesuksesan Partai Gerindra sebagai Wujud Political Goodwill dalam Implementasi Pemberdayaan Petani" yang diadakan oleh Departemen Pembangunan Daerah DPP Gerindra.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Rumah Sakit Perusahaan ini, teknologi terapan yang bisa langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan perbaikan lahan pertanian, pembukaan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha. "Juga penyediaan sumber energi terbarukan dan mengatasi masalah banjir," sambung doktor lulusan universitas ternama di Perancis ini.

Menurut Frans, untuk menu-

ju ke sana perlu investasi yang berorientasi pada rakyat kecil. Misalnya, penyediaan pangan yang terjangkau oleh seluruh rakyat (pembukaan lahan tandus/lahan tidur); pelayanan kesehatan (sistem asuransi); pendidikan formal wajib sampai dengan SLTA; pembukaan lapangan kerja (agro industri dan kelautan); pembukaan lapangan usaha (pendampingan usaha kecil, PKL); mengurangi subsidi BBM; pembangunan infrastruktur; transportasi; masalah laten masyarakat (banjir dan sampah).

Pada program penyediaan pangan yang terjangkau oleh seluruh rakyat, Frans berpendapat, pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki naluri dan ahli di bidang agraria, meskipun tidak melalui pendidikan

formal. "Kita juga bisa menyiapkan lahan garap dan lahan tidur serta lahan tandus yang sudah disuburkan dengan cukup air dan pupuk. Sehingga, sebagian besar penduduk kota besar, seperti di Jakarta akan berbondong-bondong kembali ke daerah asal untuk bertani atau berkebun," katanya.

Temu ilmiah seperti ini, kata Ketua Departemen Pembangunan Daerah DPP Gerindra, Dra. R.A.J. Noveria Parasari, adalah salah satu kegiatan dari departemen yang dipimpinnya. "Jadi kami sebagai pengurus DPP tidak berpangku tangan saja, tapi harus memenuhi amanah yang diberikan partai kepada kita. Kita harus bergerak dan bergerak," tutur Sari yang juga Ketua Bidang Kesejahteraan PIRA. ◀



- Nama**
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
 - Tempat/Tanggal Lahir**
Manggar, 29 Juni 1966
 - Istri**
Veronica, ST
 - Alamat**
Jl. Muara Karang Blok P 8 Utara
No. 27, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara 14450
- Pengalaman karier**
- 2005-2006 : Anggota DPRD Belitung Timur
 - 2005-2009 : Bupati Belitung Timur
 - 2009-2012 : Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
- Penghargaan**
- Pin emas dari Fordeka (Forum Demokrasi) 29 Oktober 2006
 - Figur anti korupsi tahun 2006 dari Koalisi Kebersamaan Tiga Pilar Kemitraan
 - 10 figur pembuat perubahan Indonesia dari Majalah Tempo

Basuki Tjahaja Purnama

Antara Jokowi, Ahok dan ke-Indonesiaan Prabowo

FOTO ALFIAN KARTIM

PENGAJUAN Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM., alias Ahok sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan calon Gubernur Joko Widodo alias Jokowi adalah komitmen Partai Gerindra terhadap kemajuan Indonesia. Meski bukan kader, bukan simpatisan, dan bukan pula anggota, namun karena dinilai paling layak memimpin Jakarta, maka dukungan itu diberikan kepada keduanya. Tak tanggung-tanggung, pinangan terhadap Jokowi dan Ahok untuk maju menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur pada 11 Juli nanti mendapat pengawalan langsung dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Lantas, bagaimanakah tanggapan Ahok atas kepercayaan dan dukungan Gerindra yang telah diterimanya. Mengapa ia menerima pinangan pencalonan tersebut dan rela mengundurkan diri dari jabatannya selaku anggota DPR RI Fraksi Golkar? Lalu, bagaimanakah obsesinya terkait pembangunan kota Jakarta ke depan? Untuk mengetahui sejumlah tanya itu *Gema Indonesia Raya* sengaja berkunjung ke salah satu rumah di bilangan Bendungan Hilir Jakarta Selatan, yang menjadi pos Ahok menuju kursi DKI 2, dan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Berikut petikannya:

Bagaimana jalannya detik-detik terakhir proses pencalonan Bapak oleh Partai Gerindra?

Sejak 24 Februari 2012 saya sudah dicari-cari oleh pak Oni (Ketua Fraksi Gerindra) dan teman-teman yang lain. Kala itu Pak Oni diperintahkan untuk ketemu saya guna menyampaikan undangan dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kemudian saya bertemu Pak Prabowo, dan beliau menyatakan bahwa Gerindra sudah mencari di seluruh Indonesia untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Gerindra rela merekrut calon dari partai lain asal bisa membantu menumbuhkan kepercayaan rakyat. Dan pilihan itu jatuh ke Jokowi dan Ahok yang sudah teruji dan kapabel untuk memimpin Jakarta. Pak Prabowo juga bilang, karena tidak memiliki jumlah suara yang cukup, maka Gerindra meminta dan mengajak PDI Perjuangan, partainya pak Jokowi.

Saat itu juga saya tanya, bagaimana saya harus membayar? Tapi, Pak Prabowo buru-buru menjawab, tidak ada yang perlu dibayar.

Lalu saya tanya lagi, bagaimana biaya kampanyenya? Beliau menjawab, nanti kita cari bersama-sama.

Buat saya, ini sesuatu yang luar biasa. Pencalonan saya juga berarti, kalau Anda serius, tulus dan jujur, bukan tidak mungkin Anda juga bisa menjadi calonnya Gerindra. Tidak perlu biaya apa-apa dan itu sudah saya buktikan.

Sejak pertemuan itu, saya tidak bertemu pak Prabowo lagi hingga 18 Maret. Yang saya tahu, selama itu, Gerindra berusaha mendekati PDI Perjuangan untuk bersama-sama memajukan pasangan Jokowi dan Ahok. Karena proses tersebut merupakan proses antarpartai makanya saya juga tidak diberitahu. Tapi langkah ini penting, karena Gerindra hanya memiliki 6 kursi di DPRD DKI sehingga tidak bisa mencalonkan sendiri. Dan membutuhkan uluran tangan PDI Perjuangan.

Tanggal 18 Maret 2012, mendekati saat akhir pendaftaran, saya sempat mendengar ada beberapa kandidat. Tapi 19 Maret, Pak Prabowo kembali memanggil saya. Beliau mengatakan, akan menghidupkan kembali ke-Indonesiaan kita. Saat itu saya sadar, apa yang dikehendaki Pak Prabowo. Saya Tionghoa, beda warna kulit, mana ada partai yang mencalonkan orang Cina. Jadi, pencalonan saya ini memang karena Prabowo ingin menghidupkan kembali rasa ke-Indonesiaan kita. Dan sampai saat ini saya tidak pernah membayar sepeserpun, termasuk pada hal-hal yang terkecil.

Buat Bapak pribadi, apa makna pencalonan Gerindra ini kepada Bapak?

Saya ingin memberi catatan, saya tidak pernah loyal pada partai, tapi saya loyal pada negara. Selama partai yang saya bela itu mau membiarkan saya mengabdikan pada rakyat dan negara maka saya akan terus ikut maju. Dan itu tidak saya dapatkan di Golkar, termasuk ketika pencalonan saya pada Pemilu gubernur Bangka Belitung. Sementara di Gerindra saya malah mendapatkan kesempatan itu secara luas, gratis bahkan dibantu secara penuh.

Apa alasan yang disampaikan Prabowo saat meminang Anda sebagai calon wakil gubernur?

Yang paling utama, karena beliau ingin membangkitkan ke-Indonesiaan kita. Terbuk-

ti dengan pencalonan saya yang tidak mempertimbangkan warna kulit dan keyakinan saya. Bagi Pak Prabowo masalah itu tidak ada urusan, karena yang dituju adalah membangkitkan kembali ke-Indonesiaan kita.

Karena itu Bapak langsung membayar tunai dengan memilih keluar dari Golkar?

Karena saya sadar, kalau bertahan akan dipecat juga. Makanya daripada dipecat lebih baik mengundurkan diri saja. Begitulah aturannya.

Banyak orang Jakarta yang tidak mengenal Bapak, apakah Bapak mengakui itu?

Kenapa saya juga mau dicalonkan, karena ini Jakarta. Saya sukses memimpin di Belitung Timur pun ternyata tidak berdampak apa-apa terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan Jakarta pasti akan lain, kalau Pak Jokowi dan saya sukses di sini pasti dampaknya akan sangat besar bagi bangsa Indonesia.

Untuk mengurangi kekurangan itu, kita akan melakukan kampanye dengan cara membuat koran dan akan dimasukkan ke rumah seluruh warga Jakarta. Dengan harapan, ini akan menjadi bahan promosi. Orang dari Belitung yang sebelumnya tidak kenal saya agar bisa mengenal. Begitu juga yang sudah mengenal saya agar biar lebih kenal lagi.

Patut diingat, saya hanya orang nomor dua. Saya bersama Pak Jokowi, beliau orang Solo yang di sini juga banyak keluarganya. Intinya masih ada waktu bagi warga Jakarta untuk lebih mengenal Jokowi dan Ahok.

Banyak pihak meragukan ketulusan Prabowo saat meminang Jokowi dan Ahok. Bagaimana sesungguhnya kontrak politik Anda dengan Prabowo?

Ini pertanyaan menarik. Sekelompok Tionghoa menilai Prabowo memilih Ahok untuk mendapatkan suara Tionghoa, supaya di Pilpres 2014 nanti dia bisa jadi presiden. Seolah-olah, Prabowo memanfaatkan Ahok untuk mendapatkan dukungan. Itu tuduhan kampungan. Saya prihatin, orang sebaik Pak Prabowo saja masih dicurigai macam-macam.

Soal imbalan itu pernah saya tanyakan pada Pak Prabowo, ketika bertemu beliau. Dia bilang, tidak ada imbalan apa-apa. Kami hanya ingin rakyat melihat bahwa Gerindra adalah partai yang benar-benar tidak main uang. Jadi kalau Pak Jokowi dan Ahok *nggak*

jadipun itu bukan kerugian bagi Gerindra. Yang penting kami sudah mengajukan orang yang jujur dan berprestasi.

Jakarta seperti apa yang ingin Anda bangun bersama Jokowi?

Jakarta baru yang maju dan modern, tertata rapi dan tidak ada rumah kumuh. Rumah kumuhnya kita hilangkan, penghuninya disediakan rumah di dalam kota Jakarta, tidak jauh beda seperti di Singapura. Dan dipimpin oleh pemimpin yang bersih, mencintai serta dicintai rakyat.

Cita-cita seperti itu bukan isapan jempol. Anggaran Jakarta sangat besar, mencapai Rp 40 triliun. Kalau dipotong 10% saja berarti ada Rp 4 triliun setahun. Kalau selama tiga tahun ada Rp 12 triliun. Jumlah itu sangat cukup untuk membangunkan rumah bagi penduduk yang selama ini hidup di kawasan kumuh. Pemotongan itu diambil dari penundaan rehab kantor, penundaan beli mobil baru, penundaan beli baju baru dan seterusnya.

Saya beruntung pernah membantu Bang Yos menjadi auditor selama satu tahun. Saya katakan, bus Transjakarta itu proyek hebat, dan sangat potensial. Pembangunannya harus diteruskan hingga 15 koridor, agar dapat menjangkau seluruh sudut Jakarta. Jarak tiap busnya antara 3-5 menit. Untuk itu dibutuhkan sekitar 120-150 bus tiap koridor, atau lebih dari 2000 bus untuk seluruh koridor. Tugas kami nantinya adalah menambah kekurangan 2000 bus itu, dan dananya pasti akan banyak. Dari mana uang itu diperoleh? Saya dan Pak Jokowi jago dalam mengatur pengurangan dan penambahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Masalah pengaturan pasar, Pak Jokowi adalah jagonya. Beliau berhasil mengubah 17 pasar tradisional menjadi modern. Di Jakarta, itu akan diteruskan. Nanti, di atas pasar itu dibangun puskesmas, agar pengunjung pasar bisa langsung berobat ketika hendak berbelanja. Juga kita harus bikin apartemen yang tidak ada parkirannya, agar penghuninya naik Transjakarta. Apartemen itu dimiliki oleh mereka yang tidak punya mobil. Itulah sebagian dari solusi kemacetan yang akan kami lakukan.

Masalah banjir, akan diselesaikan melalui banjir kanal, normalisasi sungai, juga membuat situ-situ di bagian hulu, baik di Banten maupun Jawa Barat. ◀

FOTO DOK. DPP GERINDRA JATENG



Prabowo Pesan Mobil Esemka

TARIK ulur menyangkut mobil Esemka yang terjadi beberapa waktu lalu tak luput dari pantauan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Buktinya, di tengah kesibukan yang menyita waktunya, mantan Pangkostrad itu masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke pusat produksi mobil nasional itu di Solo pada pertengahan April lalu.

Prabowo berkesempatan melihat langsung bengkel milik Sukiati, sang pelopor mobil Esemka. Dia juga meninjau tempat perakitan mobil Esemka di SMK Klaten. Serta *show room* Esemka yang terletak di belakang kampus UNS Solo. Turut dalam kunjungan Prabowo itu antara lain, Ketua Umum DPP Gerindra Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc, dan Ketua DPD Jawa Tengah H. Abdul Wachid.

Pada kesempatan itu, Prabowo memesan mobil Esemka *double* kabin. Rencananya, mobil tersebut akan digunakan sendiri. Dan, kalau benar-benar memuaskan bakal dipesan lagi dalam jumlah banyak. Untuk kebutuhan Partai Gerindra di daerah-daerah yang membutuhkan mobil sejenis.

Menurut Prabowo, keberadaan mobil Esemka sungguh membanggakan. Terutama di tengah membanjirnya produk-produk luar negeri di Indonesia. Esemka, menurut penilaian Prabowo, sanggup bersaing dengan pabrik mobil lain, jika pemerintah memiliki keberpihakan yang lebih terhadap produk anak bangsa itu. Persoalannya terletak pada mau atau tidaknya pemerintah mengembangkan produk dalam negeri ini. Apalagi ini membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ◀ **MBO**

KEBENDAHARAAN DPP

Satukan Sistem Pelaporan Keuangan Partai

SEHARI setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, tepatnya Minggu (18/3), pengurus DPD Partai Gerindra se-Indonesia tak serta merta kembali ke daerah masing-masing. Pasalnya, keberadaan para pengurus DPD se-Indonesia itu dimanfaatkan oleh Kebendaharaan DPP Gerindra untuk ikut serta dalam Lokakarya Keuangan II tentang sistem pelaporan keuangan Partai Gerindra. Acara berlangsung di Hotel Milenium Tanah Abang Jakarta.

Bendahara Umum DPP Gerindra T. A. Muliatna Djiwandono mengatakan, Lokakarya Keuangan II ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang pernah dilakukan kebendaharaan DPP. Hanya saja temanya berbeda. Pada lokakarya pertama soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara yang kali ini membahas sistem pelaporan partai.

Kegiatan tersebut, menurut Muliatna, dimaksudkan untuk memberi bekal pengetahuan kepada pengurus DPD dalam pembuatan pelaporan keuangan partai. Ini penting, karena sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar merupakan salah satu ciri maju atau mundurnya sebuah partai politik.

Setelah mengikuti acara lokakarya itu diharapkan seluruh pelaporan keuangan partai, mulai dari tingkat DPP hingga DPC sama. Karena materi yang disampaikan dalam lokakarya itu merupakan format baku, yang harus diikuti oleh seluruh jenjang kepemimpinan Partai Gerindra. ◀ **MBO**



FOTO DOK. DPP GERINDRA

DPC DEPOK, JAWA BARAT

Panggung Betawi Ngumpul

FOTO M. BUDIJOYO



KHAWATIR dengan nasib seni budaya Betawi yang semakin tergesur, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Depok dan Bekasi, Ir. H. Nuroji menggelar even seni budaya Betawi bertajuk: "Panggung Betawi Ngumpul." Acara tersebut dihelat pada Sabtu (14/4) bertempat di halaman rumah makan Betawi Ngoempoel, Jl. Raya Tanah Baru, Kelurahan Tanah Batu, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.

Panggung Betawi Ngumpul itu berlangsung dari pukul 12.00 hingga jam 24.00 WIB. Sepanjang jalannya acara, praktis membuat lalu lintas di daerah itu padat merayap. Kondisi ini disebabkan oleh hilir mudiknya pengunjung yang tidak pernah berhenti, terlebih saat malam mulai larut. Menariknya, para peserta acara ini hampir seluruhnya mengenakan baju khas Betawi.

Acara ini mengambil tema: 'Melalui Pagelaran Seni Tradisional Mari Kita Tumbuh Kembangkan Kembali Seni dan Budaya Betawi Depok'. Berbagai macam seni budaya Betawi ditampilkan dalam acara itu. Khususnya seni

budaya yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat, seperti: Gendang Pencak, Gambang Kromong, dan Lenong Betawi.

Beberapa seniman kondang Betawi ikut meramaikan acara tersebut. Mereka itu antara lain: H. Malih Tong Tong, H. Nirin Kumpul, Ucup Samin (si Entong), Madhin dan Katong, serta grup Gong Sibolong. Tak ketinggalan padepokan silat Beksi Tradisional H. Abdullah dan Giri Gombel Pasir Putih Pengasinan.

Menurut Sukardi, salah seorang panitia, rencananya panggung Betawi Ngumpul akan dilaksanakan saban tahun. Namun, untuk jenis kesenian, seperti silat Betawi atau Gambang Kromong akan dilaksanakan enam bulan sekali. Atau kalau memang dikehendaki bisa dilaksanakan lebih sering lagi.

"Apa yang dilakukan Bapak Nuroji ini patut ditiru semua kalangan, apalagi orang-orang betawi yang sudah berhasil. Apalagi tujuannya semata-mata agar seni budaya Betawi bisa bertahan hingga anak cucu", kata Sukardi. ◀ **MBO**



FOTO DOK. DPD GERINDRA JATENG

DPD JAWA TENGAH

Puja Puji Untuk Gerindra

EKSISTENSI sikap Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menolak kenaikan harga BBM menuai sambutan positif masyarakat. Terutama kaum petani dan nelayan yang hidup di pedesaan. Meski pada akhirnya sikap penolakan itu kalah di tingkat voting, namun masyarakat mengapresiasi perjuangan Gerindra tersebut.

Itulah secuil pengalaman manis yang ditemui H. Abdul Wachid, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Kabupaten Demak, Jepara, dan Kudus bertepatan masa reses, akhir April silam. Menurut Wachid, tidak sedikit anggota masyarakat yang manalami dan memberikan selamat kepadanya, terkait siap Fraksi Gerindra tersebut.

"Intinya memang masyarakat kita itu sedang kepayahan menanggung beban hidup

yang terus meningkat. Dan, kalau harga BBM itu benar-benar naik, niscaya kesulitan itu akan bertumpuk-tumpuk", kata Wachid.

Memanfaatkan masa reses itu, Wachid lebih banyak melakukan sosialisasi UU Pemilu yang baru disahkan, sesaat sebelum masa reses. Wachid melakukan itu untuk memompa semangat kader dan simpatisan Gerindra, terlebih menyangkut angka 3,5%, yaitu batas *Parliamentary Threshold* yang telah ditetapkan DPR.

"Jadi, secara nasional, Gerindra harus mampu mendapatkan suara di atas 3,5% agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Kalau sampai gagal, berarti tidak ada satupun kader yang bisa duduk di Senayan. Artinya, keinginan untuk menempatkan Prabowo sebagai presiden pun bisa terganggu", katanya. ◀ **MBO**

DPD GERINDRA NTB

Song For Sambelia



FOTO DOK. DPD GERINDRA NTB

BENCANA banjir bandang yang menimpa masyarakat Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu menarik simpati berbagai kalangan untuk meringankan beban para korban. Termasuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB dan DPC Partai Gerindra Lombok Timur.

Untuk membantu meringankan beban penderitaan para korban banjir bandang itu, DPD Gerindra NTB menggandeng Forum Anak Band se-NTB untuk ambil bagian dalam aksi penggalangan dana. Mereka menggelar kegiatan bakti sosial bertajuk *Song for Sambelia*. Acara itu dilaksanakan di Mataram pada Minggu (25/3) sore dengan melibatkan 40 grup band se-NTB.

Sumbangan yang berhasil dikumpulkan, baik berupa uang maupun makanan, diserahkan

langsung esok harinya kepada masyarakat korban banjir bandang Sambelia. Hadir dalam penyerahan sumbangan tersebut, pengurus DPD Gerindra NTB, antara lain: H. Wilgo Zainar, M. Saddudin, dan Hamza, beserta Ketua DPC Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Pada kesempatan itu, Wilgo mengharapkan agar bantuan itu bisa meringankan penderitaan para korban. Menurut Wilgo, kegiatan sosial semacam itu patut dilanjutkan, karena bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan antarwarga masyarakat.

La tak lupa menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh Forum Anak Band se-NTB dalam menyukseskan kegiatan tersebut. ◀ **MBO**

DPC TEGAL, JAWA TENGAH

Minum Susu Bersama Pak Dokter



FOTO DOK. DPC GERINDRA TEGAL

HIMBAUAN Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memasyarakatkan minum susu, sebagai bagian dari program "Revolusi Putih" ditanggapi kader dan simpatisan Gerindra diberbagai daerah. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tegal.

Pada Maret silam, dr. Budi Sutrisno, M.Kes, yang menjabat Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal dan juga anggota DPRD setempat menggalang massa untuk gerakan minum susu. Acara yang diberi nama, "Gerakan Minum Susu Bersama Pak Dokter Gerindra" ini dilaksanakan di beberapa tempat, dan melibatkan ratusan siswa-siswi. Mulai murid PAUD Cerdas, SDN I dan 2 Desa

Penusupan Kecamatan Pangkah, SD Negeri Curug Kecamatan Pangkah, dan TK Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng.

Budi Sutrisno dalam kesempatan itu berharap, kegiatan itu mampu merangsang semua kalangan untuk menjawab ajakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam mempersiapkan generasi yang akan datang. Khususnya dengan pemberian susu.

"Generasi yang akan datang haruslah generasi yang kuat, sehat dan cerdas, agar bisa memenangkan persaingan di era globalisasi. Karena itu kepada mereka sedini mungkin sudah harus dibiasakan minum susu, agar tidak tertinggal dari negara-negara lain", kata Budi menambahkan. ◀ **MBO**



FOTO DOK. DPD KESIRA BANTEN

DPD KESIRA BANTEN

Tambah Fasilitas Layanan Kesehatan

BADAN Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) merupakan sayap Partai Gerindra yang bergerak dibidang kesehatan. Seperti namanya, organisasi ini terus berusaha menyediakan pelayanan kesehatan secara murah, terjangkau, dan terpadu. Khususnya bagi keluarga kurang mampu.

Saat ini, Kesira sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia. Salah satu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kesira yang tak pernah berhenti memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas kesehatan kepada masyarakat adalah Provinsi Banten. Rencananya, Juni nanti delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten bakal meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka juga berencana mendirikan klinik dan memenuhi berbagai perlengkapan penunjangnya. Mulai dari mobil ambulans hingga kesiapan tenaga medis dan obat-obatan yang lengkap.

Pendirian klinik itu, menurut ketua Kesira Provinsi Banten dr. Bambang Susanto, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah.

"Tujuan utamanya membantu warga yang kurang beruntung dalam bidang pelayanan kesehatan. Kami yang tergabung dalam dokter spesialis dan dokter ahli merasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik buat bangsa, khususnya dalam soal pelayanan kesehatan di masyarakat," kata dr. Bambang Susanto menambahkan.

Di wilayah Banten, DPC Kesira Kota Tangsel dinilai paling maju dibanding daerah lain. Selama ini mereka sudah berjalan dan melakukan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.

Untuk itu, Bambang berharap, seluruh pengurus Kesira di kabupaten/kota Provinsi Banten segera mempersiapkan segala sesuatunya. Khususnya gedung yang akan dijadikan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum.

"Selain memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, klinik ini juga bisa digunakan untuk memfasilitasi masyarakat tidak mampu guna dirujuk ke rumah sakit daerah hingga pusat. Termasuk memberikan pelayanan bakti sosial dan kesehatan gratis di pelosok daerah," kata Bambang. ◀ **MBO**



FOTO-FOTO ISTIMEWA

LOMBOK

Berbuah MELON

Kepedulian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap nasib petani dan pertanian Indonesia bukan isapan jempol. Di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB) contohnya, DPC Gerindra setempat bekerja keras meningkatkan kemakmuran petani melalui budi daya tanaman melon.

OLEH M. BUDIONO

FANTASTIS. Itulah kata yang patut dilayangkan untuk mengapresiasi keberhasilan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Lombok Tengah (Lomteng) dalam menyejahterakan petani. Berkat upaya dan kerja kerasnya, kini sebagian petani di daerah tersebut mulai merintis jalan menuju kesejahteraan setelah berhasil mengonversi budi daya tanaman padi menjadi tanam melon.

Adalah DPC Partai Gerindra Lomteng yang memberi saran kepada para petani agar mengganti tanaman padi menjadi tanaman melon. Hasilnya, ternyata penghasilan para petani meningkat tajam. Bandingkan saja, untuk areal sawah seluas 5 are dengan menanam padi, petani hanya bisa mendapatkan hasil sekitar Rp 2 juta selama kurun waktu tiga bulan. Penghasilan itu berasal dari hasil padi untuk lahan seluas 5 are sebanyak 5 kwintal dikali Rp 400 ribu per kwintal. Jumlah tersebut belum dipotong biaya produksi yang besarnya mencapai Rp 500 ribu. Praktis, petani hanya mendapatkan hasil sebesar Rp 1,5 juta dalam rentang waktu tiga bulan. Atau Rp 500 ribu sebulan.

Tapi, setelah beralih ke tanaman melon, para petani bisa meraup penghasilan Rp 10 juta selama 70 hari untuk luas lahan 5 are. Setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp 2,5 juta, maka penghasilan bersih petani menjadi Rp 7,5 juta. Artinya, penghasilan bulanan petani setelah membudidayakan melon

jauh lebih besar dibanding ketika mereka masih menanam padi.

Meningkatnya penghasilan petani setelah melakukan perubahan tanaman dari padi menjadi melon, diakui oleh Lalu Adi (30). Menurut petani melon asal Desa Ganti, Kecamatan Raya Timur Kabupaten Lomteng yang juga simpatisan Gerindra, saat ini jumlah petani melon di desanya terus bertambah. Kini jumlahnya kira-kira mencapai 280 orang. Padahal, sebelum masuknya tanaman melon, semua petani di desa Ganti, bercocok tanam padi.

Lalu Adi yang menanam melon sejak 2008 itu, kini mulai merasakan hasilnya. Apalagi lahan melon yang dimilikinya mencapai 1 hektar. Artinya setiap panen Adi mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp 50 juta. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil penjualan panen melonnya sebanyak 50 ton. Dengan penghasilan sebesar itu, menurut Adi, kebutuhan hidup keluarganya bisa terpenuhi dengan baik. Dan, anak-anaknya pun bisa bersekolah dengan layak.

"Saya sudah bisa beli kendaraan, dan sedang menabung untuk bisa berangkat haji. Untuk saat ini, kalau partai Gerindra, khususnya di Lomteng, membutuhkan dana maka para petani tidak keberatan untuk membantu. Mereka sadar bahwa perubahan menuju kesejahteraan ini berkat perjuangan Partai Gerindra, terutama pengurus DPC Gerindra Lombok Tengah," ujar Adi.

Sekolah di Bogor

Ide mengubah dari bertanam padi menjadi petani melon dicitakan oleh DPC Gerindra Lombok Tengah untuk menjawab persoalan yang kerap dikeluhkan oleh para petani setempat. Soalnya, selama bertahun-tahun petani melakukan usaha secara turun-temurun dengan menanam padi, tapi kehidupan mereka tetap jalan ditempat alias tak maju-maju.

Bahkan, tidak sedikit petani yang jatuh miskin. Dan, lebih parah lagi, sebagian petani di sana terpaksa menjual lahan persawahannya

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara mereka sendiri memilih menjadi buruh tani atau mengerjakan pekerjaan kasar lainnya.

Melihat kenyataan itu, DPC Gerindra Lombok Tengah pada 2008 berinisiatif mengirim enam orang petani Lomteng ke Bogor. Di sana mereka ditugaskan untuk belajar cara budi daya tanaman melon. Sekembalinya dari Bogor, ke enam petani tersebut, menurut Ketua DPC Gerindra Lomteng H. Muhdan Rum, langsung menerapkan ilmu yang diperolehnya.

"Tak disangka-sangka hasil yang didapat sangat bagus. Sejak itu kami terus mengembangkan budi daya melon dan banyak petani di sekitarnya juga ikut-ikutan menanam melon, lantaran mereka melihat hasil panen yang sangat banyak," cerita Muhdan Rum kepada *Gema Indonesia Raya*.

Berkat keberhasilan itu maka jumlah petani melon di Lombok

Tengah terus bertambah. Akibatnya, produksi melon Lomteng juga terus meningkat. Saat ini melon petani Lomteng sudah bisa memenuhi seluruh permintaan melon yang ada di NTB. Bahkan mulai meluas hingga mencapai ke Surabaya dan Bali.

Untuk menghindari terjadinya kelebihan produksi melon yang bisa berimbas pada turunnya harga, DPC Gerindra Lomteng masih terus mencari potensi pasar di daerah yang lain. Semata-mata agar hasil panen petani bisa dipasarkan dengan harga yang bagus.

"Kami juga tengah memikirkan mencari teknologi yang tepat dalam pengelolaan melon menjadi produk-produk turunan.

Dengan cara begitu, tercipta lapangan pekerjaan, dan penghasilan bagi tenaga produktif yang saat ini masih menganggur yang ada di Lombok Tengah", kata Ketua DPC Gerindra Lombok Tengah itu menambahkan. ◀



Petani melon di Lombok Tengah.

Meneruskan usaha orang tuanya yang dibangun sejak 1920-an, kini Tin Kartini dan anaknya Cecep Maulana bahu membahu menjalankan Karya Seni Tanduk. Produknya sudah menembus mancanegara, bahkan dipakai untuk frame kacamata buatan Jerman.

OLEH AGUSTAMAN



FOTO-FOTO AGUSTAMAN

GAGANG KACAMATA BUATAN JERMAN ITU dari Sukaraja

ANDA mungkin penggemar dan pemakai kacamata merek terkenal buatan Jerman. Tapi tahukah Anda bahwa bahan baku pembuatan frame kacamata tersebut berasal dari sebuah desa di Indonesia, tepatnya di kawasan Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat? Ya, bahan baku gagang kacamata kelas atas tersebut memang terbuat dari tanduk kerbau yang merupakan produk kerajinan masyarakat Sukaraja.

"Tanduk kerbau memiliki keunggulan makanya digunakan sebagai gagang kacamata produksi Jerman," kata pimpinan Karya Seni Tanduk Sukabumi Cecep Maulana.

Penggunaan bahan baku tersebut, kata Cecep, setelah dia bersama industri kecil di wilayah itu mengeksport tanduk kepala kerbau ke Jerman dan Brasil, tahun lalu. "Masih ada beberapa negara lain yang meminta dalam jumlah cukup banyak, diantaranya Australia, Jepang, dan Korea. Namun, karena keterbatasan produksi, permintaan itu belum dapat dipenuhi," paparnya lagi.

Usaha kerajinan tanduk kerbau, kata Cecep, merupakan warisan turun temurun dari kakek neneknya. Menurut cerita Tin Kartini, orang tua Cecep, yang ditemui *Gema Rakyat*

Indonesia di sebuah pameran UKM di Jakarta beberapa waktu lalu, salah satu anaknya (Cecep) memang sedang giat-giatnya mengembangkan usaha yang dibangun orang tua Tin Kartini alias kakek-nenek Cecep sejak puluhan tahun silam.

Saat orang tuanya, Uba dan Onih, sudah sudah tidak sanggup lagi menjalankan usaha Karya Seni Tanduk yang sudah dijalankan sejak 1920-an, Tin Kartini lantas meneruskan usaha orangtuanya. "Kala itu pesanan sedang banyak-banyaknya sementara yang menangani usaha tidak ada lagi, Ya, daripada ditolak akhirnya pada 1970 saya memilih melanjutkan usaha ini dengan modal Rp 5 juta yang digunakan untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga perajin. Kebetulan saat itu ada pesanan dari Jepang, Korea, Eropa dan Timur Tengah untuk pembuatan hiasan dari tanduk," kenang perempuan yang biasa disapa Tin ini.

Tin mengaku, ketika itu produknya lebih banyak diminati pasar luar. Pesananpun tidak sedikit, bisa mencapai satu kontainer. Untuk memenuhi permintaan pasar kala itu, dia mempekerjakan tak kurang dari 40 perajin.

Permintaan desainpun beraneka ragam, mulai dari hiasan tanduk, patung burung, ikan dan sebagainya. "Selain melayani permintaan pasar kami juga kerap menciptakan desain baru. Setiap bulan pasti kami tawarkan desain baru supaya pelanggan tidak jenuh. Tapi biasanya pasar luar lebih banyak memesan hiasan tanduk atau patung," aku perempuan kelahiran Sukabumi 21 April 1952 ini.

Sementara desain-desain lain seperti gelang, jepitan rambut, sisir, penggaruk punggung kurang diminati. Dihadapkan barang menumpuk, Tin pun mulai memasuki pasar dalam negeri. "Saat suami saya meninggal pada 1975 sayapun total menangani sendiri usaha. Waktu itu produk banyak menumpuk, akhirnya saya menawarkan kerjasama dengan toserba Sarinah dan membuka *workshop* di rumah, di daerah Sukaraja, Sukabumi," cerita dia.

Melalui Sarinah dia kerap diajak pameran ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Selain itu Tin juga pernah bekerja sama dengan Pasar Raya, sebuah Toserba di Jakarta. Tapi karena harga sewanya yang mahal dan lamanya proses pembayaran, terpaksa kerjasama itu dihentikan. "Pembayarannya lama sekali, perputaran modal saya berhenti," keluhnya.

Saat Indonesia mengalami krisis moneter

dan berbagai guncangan, usaha Tin kena imbasnya. Pesanan dari Eropa sudah tidak ada lagi. Sedangkan Jepang, Korea menurun drastis. Pesanan paling rutin dari Timur Tengah, tapi pesannya tidak sebanyak dulu. Terpaksa Tin merumahkan beberapa perajinnya.

"Saat ini perajin tetap saya ada lima orang. Kalau ada pesanan, barulah saya bekerja sama dengan perajin di daerah tempat tinggal saya. Sayangnya, sekarang ini sulit sekali mencari perajin yang bisa mengukir tanduk menjadi hiasan patung. Jadi, kalau ada pesanan patung dalam jumlah banyak untuk waktu cepat, terpaksa saya tolak," aku perempuan paro baya yang masih terlihat enerjik ini.

Untuk mempertahankan usahanya, Tin kerap mengikuti berbagai pameran. Usahanya ini membuahkan hasil. Kini produknya sudah memasuki pasar Kalimantan, Sulawesi dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam sebulan, setidaknya Tin bisa memproduksi 500 *pieces* dengan harga mulai dari lima ribuan sampai jutaan rupiah, tergantung hiasan yang dibuat.

Sementara itu, bahan baku untuk membuat hiasan diperolehnya dari Sumatera Utara dan Tanah Abang (Jakarta). "Untuk tanduk kerbau dan sapi saya sudah ada langganan di Medan, sedangkan tanduk kambing saya sudah ada langganan di Pasar Tanah Abang," aku ibu empat anak ini.

Ke depan, Tin berharap bisa menembus pasar luar negeri kembali. "Tapi karena saya sudah tua, saat ini usaha dilanjutkan oleh anak saya, Cecep Maulana. Untuk memulai pemasaran ke luar negeri, Cecep mulai memasarkan produk lewat internet," terang Tin berpromosi.

Di tangan Cecep, Karya Seni Tanduk saat ini diakuinya masih bisa bertahan. Meski ada produk sejenis yang datang dari China, tapi kerajinan produksi Karya Seni Tanduk, seperti sisir, penggaruk, miniatur hewan, pipa rokok, aksesoris wanita, masih diminati pasar lokal. Menurut Cecep, selama ini kerajinan tangan yang diproduksinya memiliki nilai ekonomi tinggi dan beromzet lumayan, bisa mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta sebulan.

Cecep mengatakan, tingginya permintaan terhadap produk miliknya, dikarenakan keunikan bahan baku dan kualitas yang dihasilkan. "Konsumen menilai, bahan baku yang digunakan unik dan jarang. Itulah yang menyebabkan permintaan terus datang. Tentu, kita juga menjaganya dengan menjaga kualitas," tandasnya. ◀



Tin Kartini dan karyanya



FOTO ALFIAN KARTIM

Kesejahteraan belum menyentuh masyarakat pedalaman

Rentang Kendali Harus Diperpendek

SEBAGAI negara kepulauan, Indonesia menghadapi rentang kendali yang terlalu luas. Akibatnya, wilayah-wilayah yang berada di pedalaman dan perbatasan sering kali mengalami persoalan kesejahteraan dan kemiskinan. Apalagi menyangkut pelayanan publik yang tidak terlayani dengan baik. Karena itu, salah satu pemecahan adalah membuka daerah otonomi baru (DOB). Apalagi, sudah lebih dari tiga tahun Indonesia tidak lagi melakukan pemekaran untuk membuka daerah otonomi baru.

"Fraksi Partai Gerindra setuju dengan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru," kata Mestariyan Habie, anggota Komisi II dari FP Gerindra saat membacakan pandangan mini fraksi, untuk disahkan di Badan Legislatif dan selanjutnya dibawa ke Paripurna.

Namun Partai Gerindra mengingatkan bahwa daerah otonomi baru harus benar-benar memerhatikan aspirasi masyarakat dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Hal yang sangat penting, bila ada daerah otonomi baru yang tidak mampu, maka harus gabung kembali ke daerah induk," tambah Nanie Habie, sapaan anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Badan Legislasi DPR sudah menyepakati RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru sebagai usul inisiatif DPR. Ada 19 daerah otonomi baru yang akan dimekarkan, dan akan dibahas dalam RUU ini.

Daerah otonomi yang akan dibentuk tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tenggara ada sejumlah kabupaten/kota yang bakal dibentuk, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha.

Selanjutnya, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat. ◀ IF

Hasil Kunker Tidak Ditindaklanjuti

SETIAP datang masa reses, anggota dewan memiliki kewajiban konstitusional untuk turun ke lapangan melakukan kunjungan kerja (kunker), menemui konstituen. Di sana, mereka akan menggali persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sayangnya, banyak temuan dan aspirasi rakyat di lapangan tidak ditindaklanjuti oleh anggota dewan, setelah kunker selesai.

Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Sadar Subagyo, sebaiknya anggota dewan melakukan kunker bekerja sama dengan DPD RI, agar persoalan yang ditemui bisa ditindaklanjuti. "Selama ini ada gap antara DPR dan DPD".

Yakni masing-masing tidak mau kerjasama," kata Sadar ketika menerima perwakilan DPD RI yang mengadakan silaturahmi ke Fadli Zon Library.

Nah, persoalan ini bisa diatasi dengan cara setiap akan mengadakan kunker, anggota DPR menginformasikan ke orang DPD. Menurut Sadar, hal ini sangat berguna untuk menghemat anggaran dan agar dalam penanganan masalah lebih fokus. Apalagi, selama ini apa yang ditanyakan oleh anggota dewan kepada konstituen setiap reses juga sama.

Mengakhiri masa sidang III, DPR mengadakan reses selama sebulan, sejak 13 April hingga 13 Mei, dengan melakukan kunker. Kunker dibagi dalam beberapa bagian. Ada kunker komisi, yang dihadiri oleh rombongan komisi untuk menyerap temuan dari masyarakat sesuai bidang kerja masing-masing. Lalu ada kunker spesifik yang menyoroti satu masalah yang dianggap penting, serta kunker anggota yang merupakan kunker pribadi ke masing-masing daerah pemilihan. ◀ IF

Sikap Gerindra Selalu Jelas

DI sela-sela rapat paripurna pembahasan RUU Pemilu yang sangat alot, Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum tiba-tiba datang ke ruang Fraksi Partai Demokrat. Kedatangannya bukan untuk memantau sidang, tapi mengajak partai koalisi dan non-koalisi (Partai Gerindra dan Partai Hanura) untuk menandatangani draf kerjasama di parlemen. Ajakan ini memang cukup serius, apalagi saat itu sedang seriusnya pembahasan RUU Pemilu yang sangat alot.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo mengaku memang pertemuan itu terjadi dan disodori draf untuk ditandatangani pada Rabu malam, awal April lalu, ketika membahas kompromi politik untuk sukseskan RUU Pemilu. "Itu bukan kontrak koalisi, hanya draf untuk kerjasama di parlemen. Jadi Gerindra diajak untuk bersama-sama melanjutkan jalan ke depan," katanya.

Berikut isi draf yang ditawarkan Partai Demokrat itu: 1. Bersama-sama mendorong kinerja DPR RI agar lebih aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan demokrasi; 2. Bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai tahun 2014; 3. Bekerja sama secara produktif dan senantiasa bersama-sama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di DPR RI yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian Kesepakatan Politik ini dibuat dengan kesadaran dan bertanggungjawab penuh untuk mendukung terwujudnya stabilitas politik dan pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014. Ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu dua belas.

Edhy Prabowo atau wakil dari Fraksi Partai Gerindra menolak menandatangani draf kerjasama itu. Alasannya, Gerindra harus berkomunikasi dengan pimpinan di DPP Partai Gerindra. Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPP Partai Gerindra pun tak perlu berpikir dua kali untuk menolak penandatanganan draf tersebut. Alasannya, apa yang ada dalam draf bersifat normatif, tidak ada yang substansial.

"Partai Gerindra akan mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Itu tidak perlu harus ditandatangani dalam bentuk kontrak," jelas Fadli. Bahkan, katanya, Gerindra juga mendukung agar Presiden SBY dan Boediono menyelesaikan tugasnya hingga 2014.

Bagi Fraksi Partai Gerindra, bila ada kesamaan semangat dan sikap di parlemen, hal itu bisa saja terjadi. Seperti ketika Fraksi Partai Gerindra menolak hak angket pajak yang ketebulan sama dengan Fraksi Partai Demokrat. Begitu juga dengan pengesahan RUU Pemilu yang sikapnya sama dengan partai penguasa. Namun, bukan berarti Fraksi Partai Gerindra selalu ikut partai pemerintah. Dalam kasus dana talangan Bank Century dan kenaikan harga BBM, Fraksi Partai Gerindra jelas sikapnya, yaitu berseberangan dengan pemerintah dan partai pendukungnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat harus lebih didahulukan daripada kepentingan golongan atau kelompok. Dan Gerindra tak segan mengambil sikap itu. ◀ IF



Marcella Zalianty
Jadi Batari Supraba

MENCINTAI tanah air bisa dalam banyak bentuk. Memainkan seni tradisi adalah salah satunya, seperti yang dilakukan pemain film **Marcella Zalianty** saat ikut dalam pementasan wayang orang kontemporer berjudul "Arjuna Wiwaha". Di acara ini Marcella berperan sebagai Batari Supraba, istri Arjuna.

Ini memang bukan peran dalam film. Namun istri pembalap Ananda Mikola ini menilai, banyak perbedaan yang membuatnya cukup menguras tenaga. "Aku harus belajar banyak di sini meskipun di film aku pernah belajar tarian Bali. Aku juga pernah main pakai tarian Jawa, cuma di sini aku harus belajar tarian Jawa yang gemulai dan juga harus menghafalkan dialog," ungkapnya saat ditemui ketika latihan di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, akhir Maret lalu.

Marcella pun merasa tertantang untuk ikut andil dalam teater tersebut. Selain peran yang berbeda, ia juga belajar lebih banyak mengenai tarian tradisional dicampur dengan tarian modern. "Itu dilema yang sulit untuk diekspresikan, lalu juga mengombinasikan dialog dengan tarian yang bukan kegiatan sehari-hari. Untungnya ini pendekatan kontemporer," tuturnya. Mengombinasikan gerakan tari tradisional dengan gerakan tarian modern, menurut Marcella, susah dan perlu latihan serius. ◀ IF

FOTO-FOTO ISTIMEWA



Arumi Bachsin
Nasionalisme Anak Muda

TAK banyak artis yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Itu dikatakan artis **Arumi Bachsin** saat ikut dalam Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) yang dipimpin oleh paranormal dan produser film, Ki Kusumo. Bintang film *Not For Sale* dan *18+* itu ingin aktif menimbulkan rasa nasionalisme di kalangan anak muda. Sebab, anak-anak muda seusianya sudah banyak yang luntur rasa nasionalismenya.

Menurut artis kelahiran Jakarta 19 Februari 1994 itu, ikut dalam komando merah putih merupakan gerakan yang positif, agar orang selalu tahu akan jatidirinya. "Aku tidak mau munafik bahwa rasa nasionalisme di zaman globalisasi sekarang di lingkungan dan pergaulan aku itu sudah mulai berkurang. Dan itu yang masih kurang dari diri saya," kata Arumi.

Padahal, katanya, nasionalisme itu bisa mengetahui jati diri bangsa dari budaya. "Itu yang membuat kita mengetahui jati diri kita. Kita mengetahui sekarang zaman berkembang. Seharusnya itu tidak memudarkan rasa nasionalisme," ujar pecinta olahraga renang ini. ◀ IF



Abdul Harris Bobihoe
Jadi MC Sejak SMA

SOSOK yang cukup menjadi perhatian saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Maret lalu adalah lelaki berkumis yang bertugas sebagai pembawa acara (MC). Dia adalah **Abdul Harris Bobihoe**. Tidak heran bila dalam banyak acara partai berlambang kepala burung Garuda, lelaki kelahiran 18 September 1963 itu selalu mendapatkan tugas yang sama.

"Karena awalnya saya di Sekretariat DPP, maka langsung mengambil alih sebagai pembawa acara, baik dalam rapat-rapat maupun acara lainnya, di sekretariat. Dari sana, saya dipercaya menjadi MC pada acara-acara di DPP ataupun acara di DPD Gerindra," ujar Harris yang punya suara khas ini.

Menjadi pembawa acara bukan pengalaman baru bagi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra ini. Sebab, ketika masih duduk di bangku SMAN 1 Manado, Sulawesi Utara, dia sering didaulat menjadi salah satu pelaksana pada upacara tiap hari Senin di sekolah, mulai jadi MC, pembaca UUD 45, Pancasila, hingga Komandan Upacara. "Hanya satu yang nggak bisa, yaitu jadi Inspektur Upacara karena itu haknya Kepala Sekolah," ujarnya sambil tertawa.

Namun, selama mengikuti acara-acara di Gerindra, Harris mengaku makin matang. Sebab, sebagai pembawa acara, harus dengan suara dan intonasi yang tegas, apalagi untuk acara resmi. Tanpa itu, kesakralan acara tersebut akan berkurang.

Pengalaman yang berkesan selama menjadi pembawa acara, menurut Harris, adalah saat tampil bersama Anya Dwinovita dalam Pelantikan DPD Gerindra Kalimantan Selatan. "Anya begitu terkesan sampai-sampai dia mengatakan baru kali ini dia melihat acara partai yang begitu sakral," jelasnya. ◀ IF

FOTO ALFIAN KARTIM

Hj. Sriwani

Politisi Perempuan untuk Pemberdayaan Kaum “Kartini”

Aktif di berbagai organisasi semenjak remaja membuat Sriwani tak canggung masuk gelanggang politik mengikuti jejak ayah dan kakaknya sebagai anggota DPRD Sintang, Kalimantan Barat.

OLEH AGUSTAMAN

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, rangkaian memperingati Hari Kartini pada 21 April tahun ini marak dimana-mana, tak terkecuali di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berbagai acara sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh panitia, mulai dari *workshop* kerajinan tangan sulam kelengkang, lomba *fashion show* sampai pertandingan bola voli antarorganisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang. Semua kegiatan itu di bawah kendali Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sintang: Dra. Hj. Sriwani.

Kegiatan peringatan Hari Kartini 2012 hanyalah salah satu kesibukan Sriwani. Dalam kesehariannya, kegiatan perempuan yang akrab disapa Iik ini terbilang cukup padat. Tak hanya menjadi Ketua GOW Kabupaten Sintang (2009-2012), Iik juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sintang dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang. Apalagi ketika masa reses tiba, tak ada waktu buat Ketua KNPI Sintang periode 2008-2011 ini berpangku tangan. Dia selalu menyempatkan diri turun ke lapangan, menyerap aspirasi masyarakat dan para konstituennya.

“Karena saya perempuan, maka saya lebih banyak di kegiatan kewanitaan. Seperti baru-baru ini, bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang, kami dari GOW menggelar *workshop* sulam kelengkang. Tujuannya, memunculkan kembali ragam hias etnik Melayu yang hampir punah dan menjadikannya salah satu souvenir khas Sintang. Maklum, selama ini orang hanya mengenal tenun ikat khas Dayak yang sudah mendunia,” papar perempuan kelahiran Sintang, 22 Desember 1968.

Tak hanya kerajinan sulam kelengkang, perempuan yang memang hobi dan berbakat di kerajinan tangan ini juga mengenalkan kepada anggota GOW dan kaum ibu lainnya seni ketrampilan tangan, mulai dari kain *flannel*, sulam pita, sampai kerajinan tangan berbahan baku daur ulang. Tahun lalu misalnya, Iik membawa anggota GOW ke Bali mengikuti pelatihan bunga kering yang dihelat IWAPI Bali dan BKOW Bali.

GOW Sintang juga sempat berkunjung ke Bandung, belajar membuat kue tradisional

yang belum populer di Sintang. “Kini sudah banyak ibu anggota GOW kami yang pandai membuat kue dan mereka bisa menambah uang dapur dengan usaha membuat kue,” ungkap Iik sembari menjelaskan bahwa kegiatan seperti itu sudah menjadi bagian dari program kerja GOW Sintang tiap tahun. Dan, hasil studi banding ditularkan kepada anggota organisasi perempuan di Sintang.

Meski dia saat ini duduk di Komisi I DPRD Kabupaten Sintang membidangi pemerintahan, hal itu tak menghalangi tekadnya untuk berbuat sesuatu bagi pemberdayaan perempuan di tempat kelahirannya. Baginya, pada era sekarang, perempuan tidak semestinya hanya berkutat di dapur, tapi kaum perempuan harus bisa bersaing di setiap lini bersama dengan kaum laki-laki.

Bukan itu saja, perempuan merupakan motivator bagi keluarga umumnya dan buat anak-anak khususnya. “Untuk itu, wanita hendaknya mampu tampil sebagai seorang yang senantiasa memberikan spirit bagi perkembangan anak-anak untuk meraih kesuksesan,” kata ibu dua anak kembar: Fahmi Mulya Putra dan Fahtoni Dharmawan Putra ini.

Peran Perempuan

Telahir sebagai anak kesembilan dari sepuluh bersaudara pasangan Ismail Bakrie dan Aminah -- yang keduanya telah almarhum dan almarhumah -- Iik mengaku senang berorganisasi sejak masa sekolah dan berlanjut sampai berumah tangga. Sarjana sosiologi lulusan FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, yang kini tengah menempuh program master (S-2) sosiologi di universitas yang sama ini nampaknya memang sudah lama menjadi “macan organisasi”.

Pengalaman organisasi perempuan yang pernah bekerja sebagai Kepala Unit Pemasaran Asuransi Jiwasraya Sintang ini memang terbilang banyak. Sebut saja sebagai Ketua Seksi Organisasi Dharma Wanita Unit Keuangan Kabupaten Sintang (1996-1998), Ketua Bidang Wanita Pemuda Pancasila Sintang (2000-2004), Sekretaris IWABRI Sintang (1996-2010), Pengurus Kwarcab Kabupaten Sintang (2005-sekarang) dan organisasi lainnya.

Istri dari Sugiarto Mulya Dharma, seorang pegawai BRI Sintang ini mengakui, keaktifan-

nya di beberapa organisasi tersebut membuatnya tak canggung ketika memasuki kancah politik sebagai kader Partai Gerindra. Kini Iik mewakili partai berlambang kepala burung Garuda ini di DPRD Kabupaten Sintang.

“Dulu saya memang aktif sebagai ketua perempuan sebuah partai terkenal. Tapi sejak seorang teman mengenalkan Partai Gerindra dengan platform politiknya dan tokoh pembinaanya, Prabowo Subianto, saya langsung jatuh hati dan bergabung di Gerindra. Di mata saya, Prabowo itu sosok yang cerdas dan tegas. Kita butuh pemimpin seperti beliau. Maka, sangat pantas kalau Prabowo Subianto menjadi Presiden RI di 2014,” tutur Iik yang pernah menjadi dosen honorer di Universitas Kapuas Sintang.

Ada alasan lain terjun ke politik praktis? “Mungkin juga karena pengaruh tidak langsung ayah saya, Ismail Bakrie, yang pernah menjadi Ketua DPRGR Sintang pada 1968-1970. Kebetulan kakak perempuan saya yang nomor tujuh juga pernah tercatat sebagai anggota DPRD Sintang,” tutur Ketua Fraksi Nasionalis DPRD Kabupaten Sintang ini tegas.

Lebih dari itu, Iik juga ingin memupuk cap bahwa politik itu keras dan hanya menjadi dunia kaum laki-laki. Dia juga berkeinginan ada keterwakilan perempuan di parlemen setempat. Maklum, katanya, partisipasi politik kaum perempuan di wilayahnya sangat rendah.

Seperti yang dicita-citakan Raden Ajeng Kartini, Iik juga ingin semua perempuan di tanah kelahirannya khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya, bisa meningkatkan kiprah dalam pembangunan. Sebab, menurut Iik, bukan saatnya lagi perempuan hanya menjadi obyek pembangunan, namun perempuan juga harus mengambil peran signifikan.

Iik dan sejumlah anggota dewan perempuan terus berupaya agar kebijakan pembangunan yang tertuang dalam anggaran lebih sensitif gender. Khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan. Sehingga perempuan bisa mengambil peran yang sama dengan kaum laki-laki.

“Tahun ini saya melihat anggaran kita lebih peka terhadap kesetaraan gender, namun masih perlu dikritisi angka-angkanya. Namun kami akan terus mendorong sehingga dari segi kuantitas nilainya bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya. ◀